

SKRIPSI
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PADA DPR
KABUPATEN KARIMUN

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh :

APRIADI

NIM : 10675005142

PROGRAM : S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2010

ABSTRAK
ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PADA DPRD KABUPATEN
KARIMUN
OLEH : APRIADI

Sebelum berdirinya Kabupaten Karimun, DPRD Kabupaten Karimun berada di Kabupaten Kepulauan Riau dan setelah keluarnya Undang-undang No 53 tahun 1999 diresmikanlah Kabupaten Karimun pada tanggal 12 oktober 1999 oleh menteri dalam negeri Republik Indonesia. DPRD Kabupaten Karimun sekarang sudah memasuki periode ketiga dengan masa bakti 2009-2014. Ini merupakan hasil perolehan dari pemilihan umum yang diadakan pada 9 april 2009 dengan menghasilkan 30 anggota DPRD Kabupaten Karimun yang baru dilantik pada hari sabtu tanggal 30 agustus 2009. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD secara umum telah diamanatkan didalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 42 ayat 1C yang berbunyi:“DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah” Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kabupaten Karimun, penggunaan sampel dalam penelitian ini, penulis menetapkan keseluruhan dari populasi dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam kepada responden. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Karimun priode ketiga yang berjumlah 30 orang. Dalam hal penelitian ini dilapangan pelaksanaan fungsi pengawasan pada DPRD Kabupaten Karimun kurang efektif telaksana hal ini dikerenakan masih terasa dini masa jabatan yang diembankan kepada anggota DPRD Kabupaten Karimun yang baru terpilih sehingga membutuhkan waktu yang untuk melaksanakan amanah yang diberikan dan daerah generalisasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD Kabupaten Karimun yang luas Untuk itu dalam hal ini penulis menyarankan agar dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD sering

membuat agenda tentang pengawasan, mengadakan meotoring berupa laporan teriwulan, menentukan metodologi pengawasan serta harus mengadakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga yang bersifat indefenden seperti aliansi terkait disamping mengikut sertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam mengadakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	23
I.3 Tujuan Penelitian.....	24
I.4 Sistematikan Penulisan.....	25
BAB II TELAAH PUSTAKA	
II.1 Pengertian Fungsi Pengawasan DPRD	26
II.2 Pandangan Islam Tentang Pengertian Pengawasan.....	31
II.3 Fungsi Pengawasan DPRD.....	34
II.3.1. Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku	34
II.3.2. Pengawasan Terhadap APBD	35
II.3.3. Pengawasan Kerjasama Internasional Daerah	41
II.4 Tugas dan Wewenang	44
II.5 Konsep Operasional	47
II.6 Hipotesis	49
II.7 Variabel Penelitian	50

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Lokasi Penelitian	51
III.2 Jenis dan Sumber Data	51
III.2.1. Data Primer	51
III.2.2. Data Sekunder	51
III.3 Populasi dan Sampel	52
III.3.1. Populasi	52
III.3.2. Sampel	52
III.4 Teknik dan Pengumpulan Data	53
III.4.1. Interview	53
III.4.2. Kuesioner	53
III.4.3. Observasi	53
III.5 Analisis Data	53

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV.1. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Karimun	54
IV.2. Anggota DPRD Kabupaten Karimun Yang Menjabat Priode ke Tiga Tahun 2009-2014	56
IV.3. Bidang dan Tugas Masing-Masing komisi	58

BAB V HASIL PENELITIAN

V.1. Identitas Responden	63
1. Jenjang Pendidikan	63
2. Komisi	64
3. Umur	65

a. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	66
1. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah.....	67
2. Keterangan kepala Daerah terhadap pelaksanaan peraturan daerah	69
3. Impementasi fungsi pengawasan terhadap perda sudah terlaksana dengan baik	71
4. Menerima masukan dari masyarakat dalam pembahasan atau penyiapan Raperda	72
5. Pemberian Pengarahan Terhadap Pelaksanaan Perda	73
b. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD	75
1. Pembuatan Angenda Pengawasan Terhadap APBD	77
2. Pemberian pengarahan terhadap pencapaian target pelaksanaan APBD	79
3. Pengarahan yang diberikan berupa mendidik Kearah Yang Lebih Baik	80
4. Tindak penyimpangan dari Pelaksanaan APBD	81
5. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD bersama dengan anggota komisi lainnya dengan baik	82
c. Pengawasan terhadap kerjasama dengan pihak ketiga.....	83
1. Apakah pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap kerjasama Internasional telah telaksana dengan optimal	84
2. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga atau internasional sudah terlaksana dengan baik.....	85

3. Pemberian pengarahan, pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap kerjasama dengan pihak ketiga	86
4. Manfaat yang dirasakan dari kerjasama dengan pihak ketiga terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat	87
5. Sumber pembiayaan dari pelaksanaan dengan pihak ketiga	88
d. Wawancara terhadap fungsi pengawasan DPRD	90
1. Dalam satu tahun terakhir ini yaitu tahun 2009 berapa Raperda kah yang telah Bapak/saudara bahas dan disetujui menjadi Perda?	90
2. Menurut pengawasan yang Bapak lakukan apakah Implementasi dari pelaksanaan APBD Tahun 2009 sudah terlaksana secara optimal baik tepat sasaran maupun tepat waktu?	92
3. Menurut Bapa/saudara apakah kerjasama Internasional yang telah ada sekarang ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah?	96
4. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dari Tiap-Tiap Variabel	101

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Penelitian	104
Saran-Saran	108

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Masalah otonomi daerah merupakan topik yang begitu menarik untuk selalu dibicarakan baik dikalangan Ilmuan bidang Pemerintahan, Praktisi, maupun Para Pengamat. Menemukan titik pasti dari yang tepat dan sesuai untuk mengatur keseimbangan hubungan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Citra desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktek Pemerintahan semenjak berlakunya UUD 1945, terus memasuki Era Konstitusional RIS, UUDS 1950 sampai era kembalinya pada UUD 1945 yang dikukuhkan lewat Dekrit Presiden 5 juli 1959.

Bagi bangsa Indonesia desentralisasi bukanlah sesuatu yang baru, karena sejak masa penjajahan Hindia Belanda sudah ada pengaturan mengenai desentralisasi yakni *decentralisatie wet* 1903. Pada saat Indonesia merdeka, oleh pemerintah Negara yang baru dibentuk, disusun undang undang pertama yakni Undang Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) yang tidak lain adalah undang undang tentang desentralisasi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa para pendiri Negara kita memang menginginkan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Setelah kemerdekaan kemudian silih berganti hadir undang undang tentang pemerintah daerah. Masing masing undang undang memiliki nuansa yang berbeda, tetapi selalu memilih salah

satu dari dua kutub yakni sentralisasi atau desentralisasi seluas luasnya. Baru pada Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 dicoba kembangkan model desentralisasi berkeseimbangan (*equilibrium decentralization*) sebagai jalan tengah dari dua kutub yang satu tarik menarik sehingga menimbulkan ketidak setabilan penyelenggaraan pemerintah daerah

Defenisi yang sederhana mengungkapkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Sesungguhnya desentralisasi memegang peranan penting sebagai instrument pencapaian tujuan benegara dalam kerangka kesatuan bangsa yang demokratis. Untuk itu harus diperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan kebutuhan memperkuat kesatuan nasional. Dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan politik dan adminstrasi.

Didalam pasal 1 butir ketujuh Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan desentralisasi adalah : “penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan demikian yang menerima desentralisasi adalah daerah otonom, bukan hanya pemerintah daerah saja.

Adapun kebijakan desentralisasi di Indonesia pada awalnya berlandaskan pada Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang

dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2001. Namun Undang-Undang tersebut direvisi ulang ke dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2004. Mengingat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun ukuran keberhasilan dari otonomi daerah adalah terwujudnya kehidupan yang lebih baik, lebih adil dalam memperoleh penghasilan atau pendapatan terlindungnya dari segala gangguan, dan terciptanya rasa aman serta lingkungan hidup yang lebih nyaman. Salah satu aspek penting dalam otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengawasan serta memberikan pelayanan pada publik.

Faktor utama dari keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah yaitu DPRD dan kepala daerah, perangkat daerah untuk bekerja lebih terampil, disiplin dan berperilaku yang sesuai dengan nilai dan moral serta norma yang berlaku dengan memperhatikan perasarana dan sarana serta pembiayaan yang terbatas dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, sebagai mana dikemukakan dalam pasal 1 butir kedua dijelaskan “ pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam undang undang dasar Negara Republik Indonesia. Dari pemaparan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya Pemerintah Daerah bersama DPRD merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau yang dikenal dengan istilah desentralisasi untuk menjalankan kekuasaan otonomi daerah.

Adapun yang dimaksud dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Markus Gunawan dalam bukunya “Buku Pintar Calon Anggota Dan Anggota Legislatif (DPR,DPRD,DPD)” yaitu : lembaga perwakilan rakyat daerah, unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dimana DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 tahun 1974. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu alat daerah disamping kepala daerah. Didalam penjelasan umum Undang Undang tersebut diterangkan bahwa “Konstruksi yang demikian ini menjamin adanya kerjasama yang serasi diantara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, maka dalam penyelenggaraannya dalam kedudukan yang sama tinggi antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu kepala daerah memimpin di bidang eksekutif dan dewan perwakilan rakyat daerah

bergerak dalam bidang legislatif (Regen Saragih dalam Josef Riwu Kaho , 2005:77) dengan kataan lain, dapat dijelaskan tugas pokok Kepala Daerah adalah sebagai pelaksana kebijaksanaan Daerah atau Administrator, sedangkan tugas pokok DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan daerah.

Yang dimaksud dengan badan legislatif disini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Miriam Budiarmo. dalam bukunya “ Dasar Dasar Ilmu Politik” yaitu: lembaga yang legislatif atau membuat undang undang.” Adapun anggota anggotanya dianggap mewakili rakyat maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat atau nama lainnya yang sering dipakai ialah Parlemen.

Badan legislatif atau dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang memiliki lambang terdiri atas garuda di tengah tengah, padi dan kapas yang melingkari garuda, serta pita dengan hurup DPR-RI, yang terbentuk bulat dengan batasan:

1. Sebelah kanan berupa kapas berjumlah tujuh belas buah
2. Sebelah kiri berupa padi sejumlah empat puluh lima buah, dan
3. Bagian bawah berupa tangkai padi dan kapas yang diikat dengan pita dan diatasnya ada pita lain yang bertuliskan DPR-RI

Dari urgensitas terlihat bahwa tata hubungan Kepala Daerah dengan DPRD terjadi hubungan kemitraan seperti mana yang di jelaskan dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 secara tegas menyatakan DPRD sebagai badan Legislatif daerah, sedangkan pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah

dan perangkat daerah lainya sebagai badan eksekutif daerah. DPRD sebagai badan Legislatif Daerah kedudukannya sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah

Dengan demikian kedua badan tersebut merupakan “*Equal Copartnership*”. Secara tersirat hubungan kedua lembaga tersebut melaui proses rekrutmen kepala daerah yang sepenuhnya oleh DPRD dan dalam menetapkan kebijakan daerah dalam format menetapkan Perda dan APBD oleh kedua belah pihak lembaga tersebut. Sementara itu dalam tahap implementasi kebijakan kepala daerah memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD dan sebaliknya DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut.

Menurut Khloh dalam Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso (2009 : 40) setidaknya tidaknya ada tiga bentuk hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yaitu: Pertama bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi, Kedua, Bentuk kerjasama atas beberapa subjek, program, masalah dan pengembangan regulasi. Ketiga, Klarifikasi atas berbagai permasalahan. Disamping hal tersebut terdapat tiga pola hubungan lain yang umumnya terjadi antara pemerintah daerah dan DPRD yaitu antara lain:

1. Bentuk hubungan searah positif

Bentuk hubungan ini terjadi bila eksekutif daerah dan DPRD memiliki visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan dan bertujuan untuk kemaslahatan daerah itu sendiri (*good governance*) dengan ciri ciri :transparansi, demokratis, baik, berkeadilan, bertanggung jawab, dan obyektif.

2. Bentuk hubungan konflik

Bentuk hubungan konflik terjadi bila kedua lembaga tersebut saling bertentangan dalam visi menyangkut tujuan kelembagaan serta tujuan tujuan daerah. Hal ini berwujud pada pertentangan yang mengakibatkan munculnya tindakan tindakan yang tidak produktif dalam penyelenggaran pemeritahan daerah dan pencapaian tujuan daerah itu secara keseluruhan.

3. Bentuk hubungan searah negatif

Bentuk hubungan searah negatif terjadi bila eksekutif dan legislatif berkolaborasi (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan secara bersama sama menyembunyikan kolaborasi tersebut kepada publik.

Ketiga perinsip bentuk hubungan diatas adalah meliputi representasi, anggaran, pertanggungjawaban, pembuatan peraturan daerah, pengangkatan sekretaris daerah, pembinaan dan pengawasan.

Secara filosofis sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah tersebut mempunyai aspirasi terciptanya setabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam *Condition Sine Quanon* untuk mengembangkan otonomi daerah.

Untuk itu didalam pasal 25 Undang undang Nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

- b. Mengajukan rencana Perda;
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan rencana Perda tentang APBD kepada DPRD untuk membahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pada sisi lain menurut pasal 1 butir ke empat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kedua kedudukan tersebut dalam prakteknya seringkali menimbulkan konflik kepentingan dan mempersulit posisi anggota DPRD

Dengan demikian DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 27 tahun 2009 pasal 344 yaitu:

- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Selanjutnya menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 42 tugas dan wewenang DPRD ditambah dengan:

- a. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- b. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- c. Membentuk panitia pengawasan pemilihan Kepala Daerah
- d. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- e. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antara daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat.

Seperti halnya kepala daerah DPRD memiliki beban tugas yang tidak ringan, karena tugas pokoknya adalah bersama sama dengan kepala daerah menetapkan kebijaksanaan daerah baik dalam berupa peraturan peraturan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disamping itu DPRD juga menjalankan Fungsinya. Adapun fungsi dari DPRD antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi legislasi yaitu: membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- b. Fungsi anggaran, yaitu: menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah.

- c. Fungsi pengawasan, yaitu: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Menurut Josef Riwu kahao dalam bukunya “ Perospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia” mengatakan secara ringkas fungsi DPRD yaitu:

- a. Sebagai Partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijaksanaan Daerah; dan
- b. Sebagai pengawas atas pelaksanaan kebijaksanaan Daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah.

Untuk menjalankan fungsi tugas dan wewenang tersebut DPRD mempunyai kewenangan hak yang diatur dalam pasal 43 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu:

- a. Hak Interpelasi adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan Negara
- b. Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tentang kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

- c. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak Interpelasi dan hak angket.

Menurut Aldefer dalam Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso (2009 : 139) bahwa pemerintah daerah yang efektif harus dilihat dalam konteks adanya lembaga legislatif yang efektif. Oleh karena itu lembaga legislatif harus diberdayakan dalam upaya menjalankan fungsi fungsi utamanya. Pemberdayaan dimaksud disini adalah memberikan hak dan kewajiban kepada lembaga DPRD berdasarkan pertimbangan rasional dan normatif untuk menjalankan fungsinya.

Tugas dan wewenang pengawasan DPRD secara khusus tercantum dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 42 ayat 1C yang berbunyi:

“DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”

Dalam hal pelaksanaan pengawasan dalam implementasinya terdapat kecenderungan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD sudah menyangkut penyelenggaraan pemerintahan. Seyogiannya hak pengawasan DPRD hanya terbatas pada aspek kebijakan, bukan menyangkut aspek teknis

penyelenggaraan pemerintah. dengan kata lain pengawasan yang dilakukan lebih bersifat politis, bukan bersifat administratif.

Pengawasan ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme *checks and balance* antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Konsep dasar pengawasan DPRD meliputi pemahaman arti penting pengawasan, syarat pengawasan yang efektif, ruang lingkup dan proses pengawasan. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. (*Planning, Organizing, Actuating dan controlling/POAC*), untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat terdcaapai secara efektif dan efisien.

Dalam tatanan pemerintahan yang baik, pengawasan berperan memberikan umpan balik (*feed back*) kepada pemerintah daerah. Pengawasan mengharuskan memberikan informasi tersebut sedini mungkin, sebagai dari sistem peringatan diri (*Early Warning System*) bagi pemerintah daerah dan DPRD apabila terjadi kejanggalan atau penyimpangan peroses pengolahan tata pemerintahan daerah.

Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kabupaten Karimun dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel I.1 Pengawasan DPRD Kabupaten Karimun Terhadap peraturan
Daerah dari tahun 2004-2008**

Tahun Pengesahan	Pertauran Daerah Yang Telah Disahkan Dalam Melaksankana Fungsi Pengawasan DPRD Kab Karimun
2004	Sebanyak 19 perda yang telah disahkan pada tahun 2004 terdiri atas: 3 Perda perubahan tahun sebelumnya
2005	Pada Tahun 2005 Peraturan Daerah Yang Telah Ditetapkan Hanya 6 Buah Perda
2006	Pada tahun 2006 jumlah Perda yang telah disahkan adalah 6 Perda terdapat 2 Perda Prubahan
2007	Adapun jumlah Perda yang telah disahkan pada tahun 2007 sebanyak 29 Perda terdapat 12 Perda perubahan dari tahun sebelumnya
2008	Pada tahun 2008 jumlah perda yang telah disayah kan oleh DPRD Kabupaten Karimun berjumlah sebanyak 12 Perda

Sumber: *Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya jumlah produk hokum yang telah dilaksanakan dari tahun 2004 sampai dengan 2008 berjumlah 72 perda yang telah disahkan dan merupakan bahan landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan dan tatanan pemerintahan Kabupaten Karimun.

**Tabel I.2 Pengawasan DPRD Kabupaten Karimun Terhadap APBD Dari
Tahun 2004-2008.**

Tahun Anggaran	Pengawasan DPRD Kabupaten Karimun terhadap APBD yang telah disahkan pada tahun anggaran 2004-2008
2004	<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 semula berjumlah Rp.274.374.342.370,- berkurang sejumlah Rp. 25.014.197.954,- sehingga menjadi Rp.249.360.144.416,- dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1. Pendapatan</p> <p>a. Semula Rp. 221.346.088.000,-</p> <p>b. Berkurang Rp. 30.010.284.183,-</p> <p>Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 191.335.803.817,-</p> <p>2. Belanja</p> <p>a. Semula Rp. 274.374.342.370,-</p> <p>b. Berkurang Rp. 25.041.197.954,-</p> <p>Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 249.360.144.416,-</p> <p>Surplus/Defisit setelah Perubahan Rp. (58.024.340.599,-)</p> <p>3. Pembiayaan</p> <p>a. Penerimaan</p> <p>1) Semula Rp. 61.162.163.811,-</p> <p>2) Bertambah Rp. -</p> <p>Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 61.162.163.811.</p>

	<p>b. Pengeluaran</p> <p>1) Semula Rp. 8.133.909.441,-</p> <p>2) Berkurang Rp. 4.996.086.229,-</p> <p>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 3.137.823.212,-</p> <p>Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 58.024.340.599,-</p>
2005	<p>APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2005 khususnya pada anggaran pendapatan dan belanja yang ditargetkan sebesar</p> <p>1. Pendapatan Rp 316.834.043.572,-</p> <p>2. Belanja Rp.368.255.394.687,-</p> <p>Surplus / Defisit Rp. (69.412.351.115,-)</p> <p>3. Pembiayaan</p> <p>a. Penerimaan Rp. 53.839.110.921,-</p> <p>b. Pengeluaran Rp.15.573.240.199,-</p> <p>Surplus / Defisit Rp. 69.412.351.115,-</p>
2006	<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :</p> <p>1. Pendapatan Rp. 263.624.100.000,-</p> <p>2. Belanja Rp. 306.184.202.425,-</p> <p>Surplus / Defisit Rp. (42.560.102.425,-)</p> <p>3. Pembiayaan</p> <p>a. Penerimaan Rp. 49.992.137.968,-</p> <p>b. Pengeluaran Rp. 7.432.035.543,-</p> <p>Surplus / Defisit Rp. 42.560.102.425,-</p>

2007	APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2007 khususnya pada anggaran belanja yang ditargetkan sebesar Rp613.631.145.552,00 telah mencapai Rp534.392.130.916,36 dimana belanja berdasarkan urusan terbagi menjadi dua bagian yaitu : urusan wajib dan urusan pilihan untuk urusan wajib terealisasi sebesar Rp509.833.160.402,36 dan untuk urusan pilihan terealisasi sebesar Rp. 24.558.970.514,00.
2008	<p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :</p> <p>1. Pendapatan Rp. 556. 321. 995. 056,-</p> <p>2. Belanja Rp. 486.278.342.306,-</p> <p>Surplus / Defisit Rp. 70.043.652.750,-</p> <p>3. Pembiayaan</p> <p>a. Penerimaan Rp. 121.163.637.747,-</p> <p>b. Pengeluaran Rp. 191.207.290.497,-</p> <p>Surplus / Defisit Rp. (70.043.652.750,-)</p>

Sumber: *Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun*

Dari tabel diatas dilihat dalam pembiayaan kubutuhan pelaksanaan belanja daerah kabupaten karimun yang mana dalam pelaksanaannya diupayakan dalam setiap anggaran yang telah ditetapkan agar dapat dimanfaatkan secara baik efektif dan efisien serta mencapai tujuan awal dari penetapannya. Salah satu hal yang terpenting terdapatnya controlling dalam pengimplemintasi dari dari pengalokasian APBD yang mana dituntut kepada DPRD untuk melaksana fungsi

pengawasan yang mana telah diamanatkan. Tujuan utama dari pelaksanaan pengawasan ini agar penyimpangan yang kemungkinan terjadi dapat dihindarkan.

Tabel I.3 Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Karimun Terhadap Kejasama Dengan Pihak Ketiga:

Tahun	Pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Karimun terhadap kerjasama dengan pihak ketiga.
2004	Perusahaan Air Mineral. Pt Pacific Granitama. Penjualan Pertambangan Pasir Daerah Lepas Pantai Dan Laut. PT Timah Karimun tbk.
2005	PT Sembawang Group. Kerjasama daerah dalam hal pembudidayaan tanaman nenas dan pengkalenganya buah neneas.
2006	PT Wira Penta Kencana. PT Bukit Granit Minang. Kejasama dengan Pihak luar terhadap investasi daerah wisata di telunas kecamatan moro.
2007	Pertambangan boksit dengan dan pemutusan hubungan kerjasama dengan PT Granit Karimun
2008	Kerjasama PT Saipem yaitu fabrikasi anjungan pengeboran lepas pantai

Sumber: *Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun*

Dari data yang disajikan dalam tabel diatas menggambarkan beberapa perusahaan yang beroperasi di kabupaten karimun. Adanya perusahaan tersebut merupakan salah satu bentuk dari kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga maupun internasional ini mengharuskan adanya pihak lembaga legislatif daerah untuk ambil bagian dalam melakukan pengawasan. Hal ini bertujuan agar kerjasama yang dilaksanakan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat di daerah baik secara finansial, fisik, maupun sosial.

Tabel 1:4 Rapat Kerja Dan Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Karimun

No	Bulan	Kegiatan Yang Dilaksanakan
1	Januari 2009	Rapat penegasan APBD tahun anggaran 2009, perubahan kedua atas perda tahun 2002. Perubahan ke empat atas perda no 19 tahun 2002, Perubahan atas Perda no 26 tahun 2007
2	Pebruari 2009	Rapat pengikatan dana anggaran pembangunan kawasan pesisir (coastal area)
3	Maret 2009	Kunjungan kerja terhadap daerah pariwisata Kecamatan Moro Kabupaten Karimun
4	April 2009	Kunjungan serta Penyerapan aspirasi masyarakat dan LSM dalam triwulan pertama
5	Mei 2009	Rapat kerja komisi dalam program perikanan

6	Juni 2009	Kerjasama daerah bersama PT Saipem
7	Juli 2009	Urusan pemerintahan daerah Kabupaten Karimun
8	Agustus 2009	Pembentukan dan susunan organisasi kecamatan dan kelurahan lingkungan Kabupaten Karimun, Sapari Ramadhan
9	September 2009	Sidang pelantikan dan penetapan kedudukan protokoler pimpinan dan kedudukan dan anggota DPRD Kabupaten Karimun masa bakti 2009-2014
10	Oktober 2009	Penyerapan dan rapat kerja bersama masyarakat dan LSM serta kepala dinas kabupaten karimun
11	November 2009	Kunjungan kerja keluar daerah oleh masing masing anggota komisi DPRD Kabupaten karimun dalam upaya evaluasi kinerja dan perbandingan program kerja tahunan.
12	Desember 2009	Pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2009, pemilihan pimpinan PRUSDA Kabupaten Karimun.

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Karimun

Dari data diatas terlihat bahwasanya salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan agenda pengawasan selama satu tahun belakangan ini belum telaksana secara efektif jika dibandingkan dengan fungsi pengawasan terhadap perturan daerah. APBD dan kerjasama internasional

Dengan Melihat luasnya daerah generalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan tidak tertutup kemungkinan bahwa Pelaksanaan fungsi pengawasan sesungguhnya belum menunjukkan kinerja yang diharapkan. Hal ini tercermin pada semakin tingginya tingkat KKN dalam era otonomi daerah maupun banyaknya peraturan perundang undangan yang tidak dilaksana secara konsekwen dan konisten oleh pemerintah daerah. Begitu juga dengan pencapaian target dari pengalokasian APBD yang merata serta pengelolaan APBD yang efektif dan efisien sebagai mana yang diharapkan pada pencapaian tujuan awal ditetepkanya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pada sekarang ini berbagai kejadian penyimpangan akan peraturan perundang undangan dan penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi baik dalam badan legislatif maupun eksekutif. Seakan Tugas dan wewenang pengawasan DPRD secara khusus tercantum dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 42 ayat 1C telah terabaikan.

Sebuah fenomenal yang begitu mencuat sekarang di pandangan mata publik yaitu terjadinya pertikayan yang saling menjatuhkan antara pihak kepolisian dan KPK yang belum ditemukan titik jelasnya. Dimana terdapat tuduhan tindak pidana korupsi dadalam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) suatu lembaga yang melaksanakan akan fungsi pengawasan. Ini merupakan tamparan keras bagi bangsa Indonesia diamana betapa mandulnya pelaksanaan fungsi pengawasan di dalam Negara kesatuan republik Indonesia.

Di Karimun sendiri setidaknya ditemukan beberapa kasus yang tindak penyimpangan yang salah satunya baru baru ini terjadi yaitu tindak pidana penyalah gunanan kekuasaan Oleh Tim 12 yang diketuai oleh wakil bupati Karimun Bapak H,Aunur Rafiq, Mantan Sekda Karimun sebagai Sekretaris Tim, dan Asisten Tata Pemerintahan sebagai Wakil Sekretaris Tim, Terhadap sengketa pelepasan hak tanah oleh PT SIPEM. Dimana telah ditemukan tindak penyimpangan yang dilakukan oleh anggota tim 12 tersebut sehingga menyeret mantan Kabag Tapem dan Kasubag TU Bagian Pemerintahan, Camat Meral dan Kepala Desa Pangke Kepengadilan Negri Tanjung Balai Karimun terkait dalam kasus KKN.

Sebenarnya ada dua faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD yaitu antara lain Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan mengenai anggaran dan rendahnya kualitas SDM anggota dewan Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Oleh karena itulah, dengan melihat gejala diatas maka penulis ingin meneliti dan melihat keadaan yang sebenarnya dilapangan, untuk itu penulis mengambil judul “ **ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PADA DPRD KABUPATEN KARIMUN** ”

I.2 Perumusan Masalah

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan sendirinya mutu atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Penyusunan kebijakan daerah yang tepat sangat tergantung pada kecakapan anggota DPRD untuk memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi masyarakat. Pengetahuan dan kecakapan itu diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Demikian juga dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka diperlukan pendidikan dan pengalaman.

Sebagai mana dijelaskan pada latar belakang masalah bahwa pengawasan berperan memberikan umpan balik (*feed back*) kepada pemerintah daerah. Pengawasan mengharuskan memberikan informasi tersebut sedini mungkin, sebagai dari sistem peringatan diri (*early warning system*) bagi pemerintah daerah dan DPRD apabila terjadi kejanggalkan atau penyimpangan proses pengolahan tata pemerintahan daerah.

Tugas dan wewenang pengawasan DPRD secara khusus tercantum dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 42 ayat 1C yang berbunyi: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”

Untuk itu berdasarkan gejala gejala diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: **“Apakah Fungsi Pengawasan Pada DPRD Kabupaten Karimun Sudah Dilaksanakan Dengan Baik”**

I.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk: Mengetahui apakah fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Karimun telah dilaksanakan dengan efektif.

I.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini yaitu :

- I Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Karimun
- II Sumbangan pikiran kepada pihak terkait yang mempunyai hubungan dengan masalah ini dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi..
- III Sebagai bahan informasi peneliti-peneliti lainnya, dengan konteks permasalahan yang sama.
- IV Dapat menambah dan memperkaya khasanah ilmu dan pengetahuan tentang fungsi pengawasan DPRD.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Telaah Pustaka

Pada bab ini berisikan definisi pengawasan DPRD, tugas dan wewenang DPRD.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisikan tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel dan analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini berisikan gambaran umum lokasi penelitian yaitu karakteristik dan demografi DPRD Kabupaten Karimun, struktur pembagian bidang maupun komisi .

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan dan memeparkan tentang hasil penelitian yang penulis lakukan

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran saran yang diberikan untuk mengadakan perbaikan dalam memecahkan permasalahan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

II.1 Pengertian Fungsi Pengawasan DPRD

Secara haripah Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan

Dengan kata lain Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. (*Planning, Organizing, Actuating dan controlling/POAC*), untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat terdcaapai secara efektif dan efisien.

Pengertian sederhana yang dikemukakan oleh Robert J. Mokler dalam Amin Widjaja Tunggal (2002: 342) tentang pengawasan atau pengendalian adalah peroses memastikan aktivitas aktual yang direncanakan. Dan dia juga mengemukakan defenisi pengendalian manajemen (*Management Control*)” adalah: suatu usahan yang sistematis untuk menetapkan standar performa dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan performa actual dengan standar standar yang telah ditentukan, untuk menentukan apakah terdapat penyimpangan atau deviasi dan untuk

mengukur deviasi tersebut, dan mengambil setiap tindakan yang perlu untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien mungkin, dalam mencapai tujuan perusahaan.

Menurut Stoner dan Freman dalam Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso (2009:143) *controlling is the process of assuring that actual activities conform to planned activities*. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin aktivitas suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa suatu rencana kegiatan dapat berjalan atau terlaksana dengan baik sesuai prosesnya sehingga tercapinya tujuan yang diinginkan dari semula apabila fungsi pengawasan dijalankan dengan baik dan benar.

Schermerhoren di dalam Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah (317:2008) mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan pengertian ini Sechermerhoren menekankan fungsi pengawasan pada penetapan standar kerja dan pengambilan tindakan yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian kerja yang telah ditetapkan.

Secara sederhana disebutkan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi dan misi atau tujuan organisasi tercapai dengan lancar tanpa ada penyimpangan atau segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan

menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan sistematisnya.

Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan

Serta diikuti dengan pengertian pengawasan yang cukup sederhana oleh Suyanto adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Pengawasan memiliki arti penting bagi pemerintah daerah karena akan memberikan umpan balik untuk perbaikan pengelolaan pembangunan, sehingga tidak akan keluar dari jalur atau tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara bagi pelaksana pengawasan merupakan aktivitas untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Menurut Wahyu Priyono didalam kutipan artikelnya "[Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pemerintah Daerah](#)" mengatakan DPRD adalah Lembaga Politik dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/ kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam

hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Pertama. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyeburkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR.

Sedangkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga DPRD memang unik, hal ini berbeda dengan dua fungsi lainnya, yaitu fungsi legislasi dan anggaran. Kedua fungsi terakhir ini telah memiliki pedoman dan prosedur baku yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dalam bidang legislasi misalnya, terdapat UU No.10 tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam bidang anggaran terdapat Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan bahkan Menteri Dalam Negeri tiap tahun mengeluarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD. Namun dalam bidang pengawasan kebijakan yang ditetapkan

oleh pemerintah daerah, Undang Undang Susduk menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD agar tata cara pelaksanaan dan ketentuan fungsi pengawasan diatur dalam Tata Tertib DPRD. Meskipun terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah, namun Peraturan Pemerintah ini juga tidak memberi pedoman yang jelas.

Bahkan pengawasan yang dilakukan DPRD dalam Peraturan Pemerintah ini hanya disebutkan dalam pasal 43, “DPRD sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan perundang-undangan”.

Oleh karena itu, langkah yang paling mendasar untuk menguatkan fungsi pengawasan adalah:

- a. Pertama, merumuskan batasan tentang lingkup kerja dan prioritas pengawasan.
- b. Kedua, merumuskan standar akuntabilitas yang baku dalam pengawasan yang dapat diterima oleh lembaga yang menjadi sasaran dan mitra pengawasannya. Dengan memiliki dan memahami standar akuntabilitas yang baku, DPRD akan dapat menghindarkan diri dari politisasi fungsi pengawasan dan terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkannya;
- c. Ketiga, rumusan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kebijakan publik dikatakan berhasil, gagal atau menyimpang dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang telah ditetapkan;

d. Keempat, merumuskan rekomendasi serta tindak lanjut dari hasil pengawasan, baik itu pada tingkat kebijakan, proyek, atau kasus-kasus tertentu. Semua itu harus dirumuskan dalam Tata Tertib DPRD, sehingga alat kelengkapan dewan yang akan melakukan fungsi pengawasan punya satu pemahaman meskipun berasal dari fraksi yang berbeda-beda.

Untuk sekarang ini Tugas dan wewenang pengawasan DPRD secara khusus tercantum dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 42 ayat 1C yang berbunyi:“DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”

Melaalui pengawasan tersebut, DPRD dapat membangun sebuah *early warning system* atau *sistem peringatan diri*. Apabila terjadi kegagalan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tatanan pemerintahan daerah.

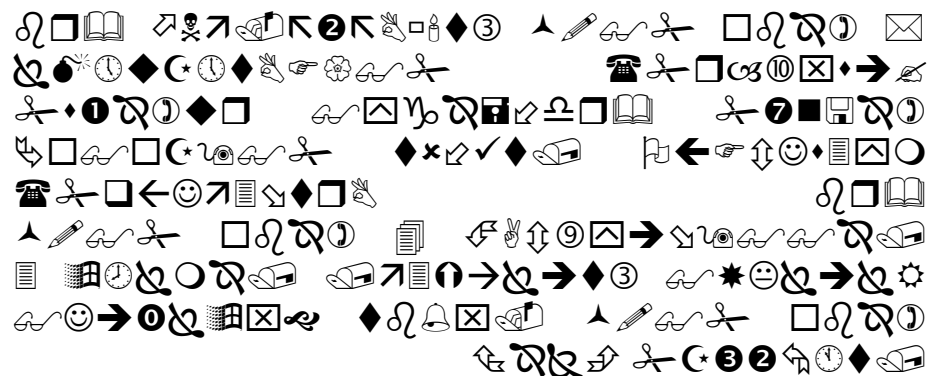
II.2 Pandangan Islam Tentang Pengawasan

Islam adalah agama yang universal (*Syamsil*), integral (*Kamil*) dan menyempurnakan (*Mutakamil*) bagi semua sistem yang ada. Dengan kata lain sesungguhnya Allah SWT jauh-jauh sebelumnya telah memberikan konsep yang paling sempurna untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Konsep tersebut dinamakan muraqabah.

Muraqabah adalah pengawasan yang sebenarnya. Karena ia merupakan sistem pengawasan diri bagi individu bukan hanya sebatas dalam kaitanya dengan aspek materi dan keduniaan belaka, namun jauh menembus batas dan kemampuan dengan nilai nilai keabadian dan kekuatan yang berada diluar kemanusiaan dan kealaman itu sendiri.

Adapun pandangan islam terhadap pemberian amanat dan pengawasan dapat kita lihat dalam al Quran surat

1. An Nisa ayat 58



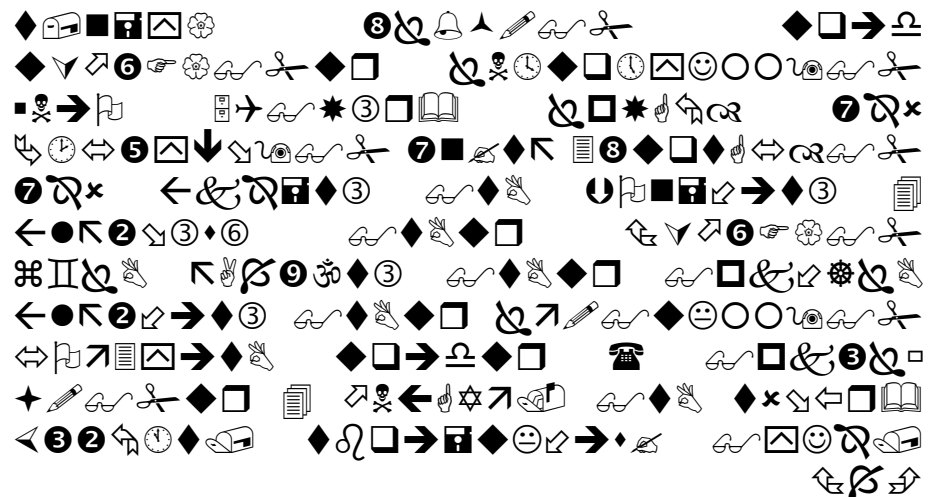
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

1. Secara umum dalam (QS. Al Fajr, 89:14)



Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.

2. Tentang Kebesaran Nya dalam mengetahui aktifitas yang dilakukannya (QS. Al-hadid 57:4)



Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa:

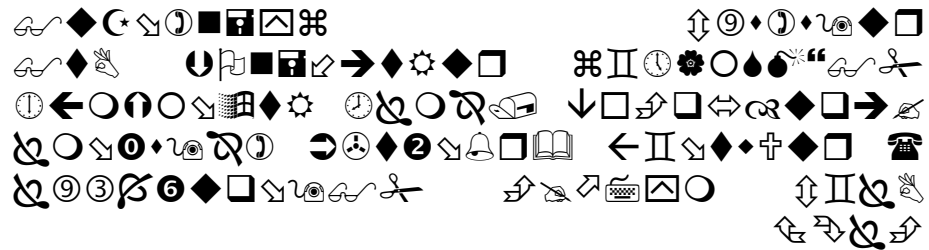
Kemudian dia bersemayam di atas 'arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

3. Tentang pengawasannya jika kita melaksanakan tindakan yang dalarang olehnya (QS. Al-Mu,min)



Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati.

4. Tetang ketelitian dan kedudukan ketika melakukan pengawasan (QS. Qaaf, 50:16)



Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya,

Kontrol atau pengawasan yang paling efektif adalah yang datang dari diri sendiri, alquran telah memberikan petunjuk bahwasanya kita memang tidak sedikitpun bisa lepas dari pengawasan Allah. Untuk itu Allah SWT telah menciptakan anggota tubuh kita untuk memberikan pertanggung jawaban pada akhirat nanti.

II.3 Fungsi Pengawasan DPRD

Berdasarkan pasal 42 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 secara umum ruang lingkup pengawasan DPRD oleh DPRD meliputi tiga hal yaitu:

II.3.1 Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku

Pengawasan DPRD terhadap produk hukum dan kebijakan yang tidak disertai dengan kekuatan penegakan (*enforcement*), misalnya melakukan pembatalan karena tidak ada satupun peraturan perundangan yang mengatakan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk hal tersebut. Salah satu kekuasaan DPRD dalam hal ini hanyalah meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah. Selain itu fungsi pengawasan DPRD dapat dilakukan dengan melakukan dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia

khusus dan pembentukan panitia panitia kerja yang dibentuk berdasarkan dengan peraturan tata tertib DPRD.

Fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dilaksanakan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang tidak bertentangan dengan ketetapan yang telah menjadi kesepakatan bersama. Hal ini diatur dalam Pasal 136 undang undang No 32 tahun 2004 ayat 1 yang menyebutkan bahwa: peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Kemudian dalam ayat 3 dan 4 dijelaskan pada ayat 3 bahwa Perda sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing daerah. Didalam ayat 4 menjelaskan bahwa Perda sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Perundang Undangan ini baik berasal dari inisiatif Pemerintah Daerah maupun DPRD sendiri yang berfungsi mengarahkan Peraturan Daerah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang undangan dan sesuai materi dengan muatan PERDA yang berpedoman dengan ciri khas masing masing daerah.

II.3.2 Pengawasan Terhadap APBD

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai tanggal 31 Desember (dalam pasal 179 UU N0. 32 Tahun 2004 : 88).

Perancangan APBD oleh kepala daerah yaitu bupati atau Wali Kota dengan menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Dengan berdasarkan prioritas dan plafon anggaran , kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (pasal 180 ayat 2 UU No. 32 tahun 2004: 89).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah Rencana tahunan keuangan Pemerintahan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember di Kota tersebut.

Rancangan APBD Kota disusun oleh bupati dengan menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah), serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah yaitu:

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional;

- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan;
- (3) Tata cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang disusun berdasarkan asas Kepastian hukum tertib penyelenggaraan pemerintah, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas;
- (4) Tata cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang sebagaimana diatas bertujuan untuk :
- (a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah;
 - (b) Mengoptimalkan peran serta masyarakat;
 - (c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - (d) Menjamin terciptanya konsistensi integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara Daerah, Propinsi dan Pusat;
 - (e) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
 - (f) Mengikuti peraturan perundang-undanganyang berlaku serta sesuai dengan Visi dan Misi Daerah

Berdasarkan Prioritas dan plafon anggaran sebagaimana dimaksud, yaitu kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, kemudian Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya

Dengan demikian Kepala daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. berdasarkan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran.

Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, yang sebelum disahkan terlebih dahulu dilaporkan pada Kepala Daerah Provinsi yakni Gubernur untuk dievaluasi (dalam pasal 186 UU 32 Tahun 2004: 91) dan kemudian dikembalikan kepada bupati untuk ditetapkan menjadi Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang Undang No 32 pasal 179 tahun 2004 disebutkan bahwa: pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai dengan 31 Desember. Agar pengelolaan anggaran daerah yang tertuang dalam APBD benar benar sesuai dengan kebutuhan daerah, DPRD dapat melaksanakan pengawasan kebijakan dari perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi. Agar APBD tersusun dan

telaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu, DPRD dapat mengarahkan penyusunan dengan pada peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan materi sebagai berikut

- 1) APBD disusun dengan pendekatan kerja;
- 2) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
- 3) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap pendapatan;
- 4) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- 5) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun sebelumnya dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD

Dengan adanya rincian penyusunan APBD dan berpedoman pada tata cara penyusunan dan penggunaannya, akan memudahkan DPRD dalam penyusunan Peraturan Daerah menyangkut APBD, perhitungan APBD dan Perubahan setiap tahun, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap APBD dapat dilakukan dengan optimal. Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan seperti beberapa kasus terdahulu yaitu kasus

korupsi oleh DPRD yang melibatkan juga kepala daerah yang erat kaitanya dengan penyelewengan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD dan Perubahannya.

Disebutkan dalam pasal 311 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi:

- 1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD;
- 2) Pengawasan sebagai mana yang dimaksudkan pada ayat 1 bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah melihat, mendengar, mencermati pelaksanaan APBD dan SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada penyimpangan dapat dilakukan beberapa alternatif yaitu:

- 1) Memberitahukan kepada KDH untuk ditindak lanjuti;
- 2) Membentuk Pansus untuk mencari informasi yang akurat;
- 3) Menyampaikanya adanya dugaan penyimpangan kepada instansi Penyidik seperti kepolisian kejaksaan, KPK

Parameter yang digunakan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2006 tentang pelaporan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

II.3.3 Pengawasan Kerjasama Internasional Daerah

Pengawasan oleh DPRD terhadap kerjasama Internasional di daerah, dilakukan baik terhadap kerjasama yang dilakukan kepala daerah tanpa persetujuan DPRD maupun kerja sama yang mengharuskan memperoleh persetujuan DPRD. Kerjasama kedua ini yakni kerjasama yang membebani masyarakat dan Daerah sebagai mana yang diatur dalam pasal 42 ayat 1 huruf f, g, dan k, Nomor 32 tahun 2004 berbunyi:

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Pengawasan terhadap kerjasama di daerah diarahkan agar Pemerintah Daerah tidak melakukan kesalahan yang mempunyai dampak langsung pada kerugian masyarakat di daerah, baik secara finansial, fisik maupun sosial. Oleh karena itu pengawasan DPRD terhadap kerjasama oleh pemerintah daerah dengan

pihak ketiga baik Internasional dan antar daerah, yang dilakukan harus jelas ruang lingkup yang dilakukan secara cepat.

Adapun ruang lingkup pengawasan DPRD terhadap kerjasama di daerah oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga meliputi:

a) Bidang yang dikerjasamakan yakni harus merupakan unsur atau kewenangan daerah bersangkutan. DPRD harus dapat mengarahkan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah bahwa yang dikerjasamakan hendaknya yang menjadi urusan daerah yang telah diamanatkan dalam Undang Undang No 32 pasal 10 yang berbunyi;

1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Kemudian pada pasal 11 ayat 1 dan ayat 3 dijelaskan bahwa:

1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dan memperhatikan kerahasiaan hubungan antar susunan pemerintahan.

3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagai mana dimaksudkan pada ayat 1 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

b) Jangka waktu kerjasama

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga baik antar daerah maupun dengan internasional perlu ditentukan sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan daerah. Peran DPRD dalam pengawasan dapat memberikan pertimbangan secara menyeluruh untuk kepentingan daerah dan masyarakat daerah khususnya, agar tidak merugikan daerah pada masa yang akan datang.

c) Manfaat kerjasama bagi Daerah.

Menurut pasal 195 ayat 1 undang undang no 32 tahun 2004 dikemukakan bahwa: Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, sinergi, dan saling menguntungkan. Pengawasan oleh DPRD terhadap kerjasama internasional dan domestik, diperlukan pengawasan yang optimal, hal ini dikarenakan agar kerjasama benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut, dan bukan kepentingan sekelompok orang atau elit semata.

d) Sumber pembiayaan.

Sumber pembiayaan yang digunakan untuk kerjasama dengan pihak ketiga tetap berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku. Pasal 67 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 ayat 1 yang berbunyi : Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi

Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut setiap sumber pembiayaan kerjasama, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga, tetap mengacu pada peraturan perundang undangan tentang keuangan daerah dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan daerah, terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan APBD. Pengawasan DPRD terhadap sumber pembiayaan kerjasama adalah mengetahui secara jelas dan pasti dari mana pembiayaan kerjasama dan dapat mengetahui hasil kerjasama, berupa (benda, barang, jasa dan uang) kemudian didistribusikan kemana. Hal ini harus diketahui agar tidak terjadi penyimpangan.

II.4 Tugas Dan Wewenang DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah yang terdiri atas anggota [partai politik](#) peserta [pemilihan umum](#) (Pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang Undang Nomor 27 tahun 2009 pasal 344 yaitu:

- a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Selanjutnya menurut Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 42 tugas dan wewenang DPRD ditambah dengan:

- a. Memilih Wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- b. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- c. Membentuk panitia pengawasan pemilihan Kepala Daerah
- d. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- e. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antara daera dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah [Peraturan Perundang-undangan](#) yang dibentuk oleh [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](#) dengan persetujuan bersama Kepala daerah dimana Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk menjalankan fungsi tugas dan wewenang tersebut DPRD mempunyai kewenangan hak yang diatur dalam pasal 43 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu:

- a. Hak Interpelasi adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan Negara
- b. Hak Angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tentang kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan.
- c. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak Interpelasi dan hak angket.

II.5 Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam identifikasi data yang diperlukan dalam pengukuran variabel maka penulis mengemukakan konsep operasional mengenai: Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun.

Pada penelitian ini pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan legislatif sebagaimana dimaksudkan Pada Pasal 42 ayat 1 huruf C Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”

Berdasarkan pasal 42 ayat 1 huruf c Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 secara umum ruang lingkup pengawasan DPRD oleh DPRD meliputi tiga hal yaitu:

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang undangan lainnya (Peraturan Kepala Daerah, keputusan Kepala Daerah dan lain sebagainya)

Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkan peraturan daerah;

b. Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD

Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Pengawasan Terhadap Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap kerjasama daerah oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga baik lokal maupun internasional, meliputi : bidang yang dikerjasamakan, jangka waktu kerjasama, manfaat bagi daerah dan sumber pembiayaan.

II.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru pada teori-teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris dimana diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian yang jawabanya belum empirik(sugiono 2005:70)

Berdasarkan latar belakang masalah perumusan masalah, maka penulis mengambil hipotesis yaitu: **“Diduga Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada DPRD Kabupaten Karimun Belum Telaksana Dengan Baik.”**

Dikarenakan :

1. Ruang Lingkup pengawasan DPRD terabaikan
2. Banyaknya peraturan perundang undangan yang belum telaksana dengan kosekwen dan konsiten.

II.7 Variabel Penelitian

Adapun variabel yang menjadi objek penelitian ini adalah fungsi pengawasan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun adalah:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
2. Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD
3. Pengawasan terhadap Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah di lembaga legislatif daerah atau DPRD Kabupaten Karimun. Yang merupakan salah satu lembaga melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagai mana yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya.

I.4 Jenis dan Sumber Data

III.2.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Responden dari penelitian ini yaitu para anggota legislatif yang menjalankan kekuasaan penuh terhadap pengambilan keputusan.

- a. Data tentang responden.
- b. Data pelaksanaan program pengawasan DPRD
- c. Data tentang aktivitas dan kerja DPRD

III.2.1 Data Sekunder

Yaitu Data yang diperoleh melalui instansi-instansi pemerintah yang terkait erat dengan penelitian ini. Data tersebut berfungsi untuk mempermudah penelitian antara lain data:

- a. Struktur DPRD.
- b. Data sekunder lainnya yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian ini

II.4 Populasi dan Sampel

III.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.(Sugiyono, 2005 : 90).

Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah lembaga legislatif (DPRD) Kabupten Karimun yang berjumlah 30 orang.

No	Populasi	Jumlah
1	DPRD Kabupaten Karimun	30 orang
Jumlah Keseluruhan Populasi		30 orang

** Sumber DPRD Kabupaten Karimun 2009*

III.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karna keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. (Sugiyono, 2005 : 91).

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan maupun keterwakilan dari populasi yaitu jumlah anggota DPRD Kabupaten Karimun yang berjumlah 30 orang.

III.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

III.4.1 Interview

Yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah penelitian, dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

III.4.2 Kuesioner

Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan (angket) yang disusun secara tertulis dan diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban data yang dicari.

III.4.3 Observasi

Yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

III.5 Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpulkan, maka data tersebut akan dikelompokkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah fungsi Pengawasan DPRD kemudian diambil dalam suatu kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

I.1 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Karimun

Sebelum berdirinya Kabupaten Karimun, DPRD Kabupaten Karimun berada di Kabupaten Kepulauan Riau dan setelah keluarnya Undang-undang No 53 tahun 1999 diresmikanlah Kabupaten Karimun pada tanggal 12 oktober 1999 oleh menteri dalam negeri Republik Indonesia. Setelah diresmikan Kabupaten Karimun maka dibentuklah DPRD Kabupaten Karimun yang mana pembentukan keanggotaan DPRD Kabupaten Karimun periode pertama tahun 1999-2004 dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara Parpol peserta pemilu tahun 1999 yang dilaksanakan di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau. Peresmian pelantikan pertama keanggotaan DPRD Kabupaten Karimun dilaksanakan pada 2 November 2000 oleh bapak H. Edwerd Arfa, SH kepala pengadilan negeri Tanjung Pinang yang bertempat di DJ Bea Cukai Kantor wilayah II tanjung balai karimun.

Penempatan sementara gedung DPRD Kabupaten Karimun yaitu di sebuah ruko di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Tanjung Balai Karimun pada hari jum'at tanggal 24 November 2000 dan pada tanggal 25 Februari 2001 Perkantoran DPRD Kabupaten Karimun pindah kegedung Nasional Jalan Yos Sudarso No. 5 Tanjung Balai Karimun. Setelah selesai pembangunan gedung DPRD Kabupaten Karimun di Jalan Canggai Putri Tebing, yang diresmikan pada tanggal 12 oktober

2002 oleh Mandagri. Maka DPRD Kabupaten Karimun bertempat di Jalan Canggai Putri Tebing sampai sekarang.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan DPRD Kabupaten Karimun priode tahun 1999-2004 , maka diadakan pemilihan umum keanggotaan DPRD Kabupaten Karimun priode kedua tahun 2004-2009 yang dilaksanakan pada bulan april tahun 2004 yang menghasilkan 25 orang anggota legislatif Kabupaten Karimun. Pelantikan Anggota legislatif priode 2004-2009 dilaksanakan pada tanggal 30 agustus 2004 oleh kepala Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun digedung DPRD Kabupaten Karimun pada rapat paripurna istimewa.

Begitu juga setelah berakhirnya masa jabatan anggota legislatif Kabupaten Karimun priode kedua tahun 2004-2009 maka diadakan pemilihan anggota legislatif kembali priode ketiga dengan masa jabatan 2009-2014. Adapun pelaksanaan pemilihan umum ini diadakan pada 9 April 2009 dimana telah menghasilkan 30 orang anggota DPRD Kabupaten Karimun yang akan menjabat priode ketiga. Dalam rangka pelaksanaan pelantikan anggota DPRD priode ketiga ini di hadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah dalam Sidang Istimewa DPRD Kabupaten Karimun dengan agenda Pemberhentian anggota DPRD masa bakti 2004-2009 sekaligus Pelantikan 30 anggota DPRD baru untuk masa bakti 2009-2014 di gedung DPRD Kabupaten Karimun, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009. Pengucapan sumpah dan janji anggota dewan yang baru dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Karimun, Zainuddin SH.

I.2 Daftar Anggota DPRD Kabupaten Karimun Yang Menjabat Priode Ke Tiga Tahun 2009-2014

DPRD dan pemerintah daerah adalah lembaga yang melayani berbagai kepentingan publik karena keduanya merupakan representasi dari masyarakat daerahnya. “Oleh karena itu, munculnya berbagai tuntutan dari masyarakat kiranya dapat menjadi sumber inspirasi baru dalam merealisasikan kehendak masyarakat tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi kita terhadap kepercayaan dan amanah yang diberikan,”

Hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD diibaratkan sebagai dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan, saling mengisi, saling mempengaruhi dan bersinergi dalam konteks kepedulian terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun ke 30 anggota Dewan Kabupaten Karimun yang baru untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat pada periode ketiga tahun 2009-2014 antara lain adalah:

1. Hj.Rosmeri dari Partai Golongan Karya,
2. Raja Sjariful Alamshah A Md dari partai Golongan Karya,
3. Djumadi dari partai Golongan Karya,
4. Drs.R. Kamaruddin MSi dari partai Golongan Karya,
5. R Bakhtiar S.Ag.MM dari partai Golongan Karya,
6. H Muhammad Asyura SE dari partai Golongan Karya,
7. Anwar Hasan SH dari partai Golongan Karya
8. H. Zamhur Abdul Kadir SH dari PAN,

9. Jhon Abrison SE dari PAN,
10. Drs. H. Anwar MSi dari PAN,
11. H Iwan Kusuma Darmaja SH dari Partai Demokrat,
12. Jamaluddin Sahari SH dari Partai Demokrat,
13. Azmi dari Partai Demokrat,
14. Bakti Lubis SH dari Partai Hanura,
15. Drs. Ady Hermawan dari Partai Hanura,
16. Zulfikar dari Partai Hanura,
17. Siti Saparani dari PPP,
18. Suharsono dari PPP,
19. H Kamaruddin dari PKS,
20. H Muhammad Taufiq SH dari PKS,
21. Rodiansyah dari PBR,
22. Isnuriman Ismail dari PBR,
23. Syahril, SS. MM dari PBR
24. Jamaluddin SH dari PDI-P,
25. Rasno dari PDI-P,
26. H Zainuddin Ahmad dari PDI-P,
27. Sudirman SE dari PKB,
28. Rocky Marciao Bawole dari PKB,
29. Sujoko dari PIB,
30. Abdul Hafid dari PNI Marhaenisme

I.3 Bidang Dan Tugas Masing- Masing Komisi

Dalam melaksanakan tugas yang telah atau yang akan dilaksanakan baik di sebuah organisasi sekecil apa pun sangat dibutuhkan pembagian kerja yang jelas hal ini agar tujuan dari apa yang ingin dicapai dapat telaksana dengan baik. Dengan demikian didalam keanggotaan DPRD membagi dalam bentuk komisi. Dikarenakan jumlah anggota DPRD Kabupaten Karimun berjumlah 30 orang maka hanya terdapat tiga komisi sebagai mana yang telah ditetapkan oleh undang undang..

Komisi yang di bentuk oleh DPRD merupakan sebagai alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap tiap fraksi. Pergantian anggota komisi dapat dilakukan oleh fraksi apabila anggota komisi yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

Adapun susuna bagian dan komisi berserta dengan jajaran kenaggotaan yang mana telah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Karimun priode 2009-2014 bersama dengan tugasnya antara lain:

1. Ketua : R. BAKHTIAR, S.Ag. MM
2. Wakil Ketua I : H. Zamhur, SH
3. Wakil ketua II : Rasno
4. Komisi A

Bidang Hukum dan Pemerintahan

Ketua : Jamaluddin Sahari SH

Wakil ketua : Syahril SS. MM

Sekretaris : Drs. H. Anuar, M.Si

Anggota : H. Kamaruddin

Sujoko

Zulfikar

Jamaluddin, SH

Anuar Hasan, SH

Hj. Rosmeri

Didalam pelaksanaan fungsi dan tugas dalam bidang hukum dan pemerintahan dimana Komisi A ini mempunyai lapangan kerja antara lain:

- a) Pemerintahan
- b) Agama
- c) Ketertiban dan Keamanan
- d) Penerangan/Pers
- e) Hukum dan Perundang Undangan
- f) Perizinan
- g) Pertahanan
- h) Kesehatan
- i) Kepegawaian dan Aparatu
- j) Sosial Politik
- k) Organisasi Masyarakat
- l) Pemberantasan KKN
- m) Perlindungan Ham dan Perlindungan Konsument
- n) Pelaksanaan Otonomi Daerah

- o) Lintas Batas Pantai Dan Perairan
- p) Pendidikan
- q) Kepemudaan Dan Olah Raga
- r) Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
- s) Inpektorat Daerah
- t) Keperpustakaan dan Kearsipan
- u) Pemerdayaan Masyarakat Dan Kesatuan Bangsa
- v) Pencegahan Narkoba, Miras, judi dan Prostitusi

5. Komisi B

Bidang Perekonomian, Keuangan Dan Anggaran

Ketua : Drs. Ady Hermawan

Wakil ketua : Suharsono

Sekretaris : Isnuriman Ismail

Anggota : Azmi

: Abdul Hafid

: Sudirman, SE

: Drs R. Kamaruddin, MSi

: R. Sjariful Alamshah, A.Md

Komisi B ini mengatur dan menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang Perekonomian, Keuangan, dan Anggaran dengan daerah generalisai lapangan pelaksanaan tugas yaitu:

- a) Keuangan daerah
- b) Perpajakan
- c) Retribusi
- d) Perbankan
- e) Perusahaan daerah dan Perusahaan Patungan
- f) Penanaman Modal
- g) Pangan / Logistik
- h) Koperasi / Dunia Usaha
- i) Perindustrian dan Pedagangan
- j) Pariwisata, Kebudayaan dan Cagar Budaya
- k) Kependudukan
- l) Statistik
- m) Peranan Wanita

6. KOMISI C

Bidang Pembangunan Dan Lingkungan Hidup

Ketua : H. M. Taufiq, SH

Wakil ketua : H Iwan Kusuma Darmaja SH

Sekretaris : Bakti Lubis,SH

Anggota : siti Saparani

: Jhon Abrison, SE

: Rocky Marciano Bawole

: H. Zainudin Ahmad

: Rodiansyah

: H. M. Asyura,SE

: Djumadi

Dalam bidang pembangunan dan lingkungan hidup ini para anggota legislatif yang tergabung dalam komisi C yang menjalankan tugas yang fungsi dalam lingkungan generalisasi antara lain adalah:

- a) Pekerjaan umum
- b) Tata Ruang Wilayah
- c) Pertamanan dan Pemakaman
- d) Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- e) Perhubungan
- f) Pertambangan dan Energi
- g) Perumahan Rakyat
- h) IPTEK
- i) Pos dan Telekomunikasi
- j) Komunikasi Informasi
- k) Pertanian Peternakan perkebunan dan kehutanan
- l) Kelautan dan Perikanan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Identitas Responden

Untuk melanjutkan pembahasan mengenai fungsi pengawasan pada DPRD terlebih dahulu penulis tetapkan beberapa identitas responden dari data yang diperoleh dari kuesioner tersebut, di bawah ini disajikan data dalam tabel distribusi yang akan dijelaskan satu persatu.

Identitas yang ditentukan untuk memberikan gambaran tentang signifikan antara data responden dengan analisis yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian yang dikaji.

Beberapa identitas Responden yaitu:

1. Jenjang Pendidikan

Sepanjang sejarah perkembangan dunia yang bersifat dinamis ini, faktor pendidikan menjadi kemutlakan yang harus diperhatikan dengan seksama oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal usia. Artinya tuntutan akan pendidikan terus mengitari siklus kehidupan manusia, bahkan pendidikan senantiasa menempati posisi teratas dalam kriteria pencapaian suatu kualitas dan produktivitas yang baik.

Pendidikan merupakan segala usaha untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemampuan manusia, baik jasmani maupun naluri yang berlangsung seumur hidup, baik dijalur formal maupun informal dalam mengembangkan pembangunan sumber daya manusia.

Tabel V.1 Jawaban Responden Tentang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamatan SLTA	14	47
2	Perguruan tinggi	16	53
Jumlah		30	100

Sumber: hasil Penelitian Lapangan: Tahun 2009

Tabel V.1 di atas memperlihatkan tingkat pendidikan responden penelitian, yakni terdapat 14 responden (47 %) yang berbekal pendidikan SLTA, dan selebihnya 16 responden (53 %) yang sudah mencapai jenjang pendidikan tinggi yaitu sarjana dan Diploma.

2. Komisi

Disamping tingkat pendidikan tersebut, identifikasi responden penelitian dapat ditinjau dari kedudukan seseorang anggota DPRD dalam struktur atau didalam komisi yang merupakan faktor yang turut mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seseorang anggota legislatif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Tabel V.2 Penempatan kedudukan anggota DPRD Kabupaten Karimun

No	Kedudukan	Jumlah	Persentase
1	Ketua – Wakil Ketua	3	10
2	Komisi A	9	30
3	Komisi B	8	27
4	Komisi C	10	33
Jumlah		30	100

Sumber DPRD Kabupaten Karimun tahun 2009

Dari table diatas dapat dilihat penempatan kedudukan dan jumlah keangotaan DPRD dalam suatu komisi antara lain terdapat 3 orang (10%) yang menjabat sebagai Ketua DPRD dan dibantu dengan 2 orang wakil. 9 orang (30%) berada dikomisi A, sebanyak 8 orang (27%) di komisi B dan 10 orang (33%) di komisi C.

3. Umur

Identifikasi responden penelitian dapat ditinjau dari tingkat umur yang dimiliki karena konsepsi umur merupakan faktor yang turut mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari berdasarkan kematangan dan pengalaman yang telah di jalani selama ini.

Keadaan anggota DPRD Kabupaten Karimun Kepulauan Riau priode 2009-2014 berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini :

Tabel. V.3 Anggota DPRD Kabupaten Karimun Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	25-35	7	23
2	36-45	14	47
3	46-55	9	30
Jumlah		30	100

Sumber : *Data Dari DPRD Kabupaten Karimun*

Tabel V.3 di atas memperlihatkan kelompok umur responden penelitian, yakni terdapat 7 responden (23%) yang berumur 25-35 tahun, kemudian terdapat pula 14 responden (47%) yang berumur 36-45 tahun, sebanyak 9 responden (30%) berumur 46-55 tahun.

A. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

Ditahun 2009 pemerintah kabupaten karimun telah menghasilkan sebanyak 15 perda yang disahkan bersama anggota legislatif Kabupaten Karimun. Dalam penyusunan peraturan daerah, anggota DPRD harus lebih banyak berperan sebagai sumber ide dan gagasan sesuai dengan kedudukannya sebagai insan politik sudah selayaknya bermain pada ranah politik, yakni memilih alternatif terbaik bagi masyarakat dan berbagai alternatif tersedia.

Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, Peraturan Daerah harus menjadi acuan seluruh kebijakan publik yang dibuat termasuk didalamnya sebagai acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah. Sebagai contoh kongkritnya adalah Perda tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Strategik Daerah (RESENTRADA)

Kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan memang memberikan tantangan tersendiri dan fungsi ini dapat memberikan peluang besar bagi DPRD untuk membuktikan kredibilitasnya pada rakyat. Namun kewenangan ini dapat mudah terjebak dalam kepentingan politik praktis yang bersifat sesaat atau sumber korupsi, dan tidak lagi menjadi instrument DPRD dalam efektifitas pelaksanaan berbagai peraturan daerah dan agenda penting pembangunan daerah.

Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan di lapangan bahwasanya pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah belum telaksanan dengan baik hal ini terlihat dengan fenomena yang terjadi di lapangan dimana masih ditemukan praktek prostitusi yang ada di Kabupaten Karimun. Sebagai

mana praktek prostitusi merupakan salah satu bentuk tindak penyimpangan kesusilaan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan DPRD untuk menangani baik dalam hal pelaksanaan tatanan pemerintahan.

Sebenarnya telah dibentuk sebuah aturan yang mengatur tentang praktek prostitusi yang ada namun belum diatur secara khusus. Hal ini berdasarkan wawancara terhadap salah satu anggota DPRD Kabupaten Karimun yang mana merupakan ketua PANSUS dari penanganan dari kasus penertiban pekerja seks komersial tersebut yang ada di Kabupaten Karimun. Adapun aturan yang mengatur yaitu dalam *Perda Nomor 06 tahun 2002 Tentang Pelanggaran Kesusuialaan* yang diupayakan dalam penertiban praktek prostitusi. Namun secara pengamatan yang dilakukan sampai sekarang praktek prostitusi yang ada di Karimun masih saja marak berjalan seperti biasanya. Walaupun pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum untuk menangani pemasalahan prostitusi.

Hal diatas menggambarkan bahwasanya pelaksana terhadap peraturan daerah mengalami kelemahan dan tidak dilaksanakan dengan baik oleh para apratur daerah dalam hal penegakanya. Semenetara dari sisi lainya dituntut kinerja DPRD Kabupaten Karimun untuk meningkatkan fungsi pengewasan dalam pelaksanaan peraturan daerah dan perundang undangan bersama perangkat daerah belum telaksanan dengan baik.

1. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah

Pengawasan terhadap peraturan daerah yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Karimun merupakan suatu hal yang mutlak yang menjadikan

keharusan dalam salah satu fungsi anggota legislatif untuk melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang undangan No 32 tahun 2004. Tujuan dari pelaksanaan Fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini adalah agar segala sesuatu yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berjalan sesuai dengan aturan dan acuan awal yang telah ditetapkan. Sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan daerah dan peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi. Namun apabila terjadi tindak penyimpangan peraturan daerah DPRD dapat mengambil kebijakan untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Dalam konteks pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap peraturan daerah pengawasan yang dilaksanakan bersifat *Preventive* dan pengendalian bukan bersifat memeriksa. Fungsi pemeriksaan berada ditangan lembaga pemeriksaan yang memiliki hak otoritas dan keahlian profesional misalnya BPK atau Akuntan yang bersifat Independen. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD dapat telaksana dengan baik.

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah oleh DPRD Kaupaten Karimun dapat dilihat dalam tabel di bawah ini berdasarkan pertanyaan yang diutarakan dalam kusioner.

Tabel V:4 Tanggapan responden mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan daerah

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	21	69,9
2	Kadang-kadang	7	23,3
3	Tidak pernah	2	6,6
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Tabel diatas memperlihatkan bahwa 21 orang atau sekitar 69,9% responden menyatakan sering melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah. 7 orang atau sekitar 23,3% menjawab kadang-kadang, dan hanya 2 orang atau sekitar 6,6% menyatakan tidak pernah melaksanakan.

Data diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah dapat dikategorikan baik. Hal ini terlihat bawasanya dari 21 responden atau 69,9% menyatakan sering. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan para anggota DPRD Kabupaten Karimun memiliki kesadaran untuk berusaha menjalankan fungsinya terhadap pengawasan peraturan daerah dengan baik.

2. Keterangan Kepala Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Sebagai mana yang diatur dalam undang undang no 22 tahun 2003 pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) bahwa

- 1) DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta Pejabat Negara, tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, badan hokum atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan

tentang sesuatu yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan Negara

- 2) Setiap pejabat Negara, pejabat pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota badan hukum atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD sebagai mana yang dimaksudkan pada ayat (1)
- 3) Setiap pejabat Negara, pejabat pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota badan hukum atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksaan sesuai dengan peraturan perundangan.

Permintaan keterangan ini merupakan perwujudan dari pertanggung jawaban oleh kepala daerah terhadap pelaksanaan peraturan daerah apabila terjadi penyimpangan.

Untuk mengetahui hasil penelitian terhadap permintaan keterangan atau pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan peraturan daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel V:5 Tanggapan responden mengenai permintaan keterangan kepada kepala daerah terhadap pelaksanaan Perda

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	17	56,6
2	Kadang-kadang	9	30
3	Tidak pernah	4	13,3
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah jawaban yang banyak Tentang Apakah pernah meminta keterangan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan peraturan daerah oleh Kepala Daerah sebanyak 17 (56,6%) responden, kemudian diikuti Jawaban Kadang-kadang sebanyak 9 (30%) Responden, dan kemudian diikuti jawaban Tidak pernah sebanyak 4 (13,3%) Responden.

Berdasarkan hasil angket penelitian di atas Apakah pernah meminta keterangan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan peraturan daerah oleh kepala daerah secara sederhana dapat disimpulkan bahwa secara umum telah dilaksanakan. Karna segala sesuatu yang dilaksanakan kepala daerah harus dipertanggung jawabkan.

3. Implementasi fungsi pengawasan terhadap perda sudah telaksana dengan Baik

Untuk mengetahui apakah implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Karimun terhadap perda sudah telaksana dengan baik dapat dilihat dari table berikut ini.

Tabel V:6 Tanggapan responden mengenai implementasi fungsi pengawasan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sudah	23	76,6
2	Kadang-kadang	2	6,6
3	Tidak pernah	5	16,6
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Setelah mengamati table diatas dapat dijelaskan bahwasanya sebanyak 23 orang atau 76,6 % Responden menyatakan sudah, sedangkan 2 orang atau 6,6% responden menyatakan kadang kadang dan sebanyak 5 orang atau 16,6% responden menyatakan tidak pernah.

Memang sudah seharusnya seluruh anggota DPRD mengupayakan agar pengimplementasian fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang telah diamanatkan sebagai wakil rakyat.

4. Menerima Masukan Dari Masyarakat Dalam Pembahasan Atau Penyiapan Raperda.

Dengan adanya masukan yang bersifat membangun akan mengarahkan kita untuk mengintrofeksi apa yang telah atau apa yang akan dilaksanakan sehingga segala bentuk kekurangan dapat diperbaiki. Masukan dari masyarakat kepada DPRD merupakan salah satu upaya pengintrofeksian terhadap pelaksanaan tugas maupun fungsinya yang telah dijalankan Untuk mengetahui apakah anggota DPRD sering menerima masukan dari masyarakat dalam rangkan penyiapan ataupun pembahasan Raperda dapat dilihat berdasarkan tabel berikut.

Table V:7 Tanggapan responden apakah sering menerima masukan dari masyarakat dalam pembahasan atau penyiapan Raperda.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	6	20
2	Kadang-kadang	21	69,9
3	Tidak pernah	3	9,9
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Kita memperoleh jawaban dari table diatas behwasanya sebanyak 6 orang atau 20 % responden menyatakan sering, sedangkan sebanyak 21 orang atau 69,9% responden menyatakan Kadang-kadang dan sebanyak 3 orang atau 9,9 % menyatakan tidak pernah.

Didalam penerimaan masukan dari masyarakat merupakan salah satu proses penetapan Perda dimana masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda. Dengan rambu rambu tersebut diharapkan DPRD dan Pemerintah daerah mempunyai alat ukur yang jelas dalam penyusunan dan penetapan satu Raperda. Dilihat dari kenyataan diatas penerimaan masukan dari masyarakat belum maksimal telaksana atau kurang baik. Ini terbukti sebanyak 21 orang atau 69,9 % responden menyatakan kadang kadang,dan yang menyatakan sering hanya 6 orang atau sebesar 20 %. Masalah ini sebenarnya tidak boleh berkelanjutan terjadi kerena masyarakat memiliki peranan utama dan mempunyai hak untuk memberikan dan dipinta serta ambil bagian dalam pembahasan Raperda.

5. Pemberian pengarahan terhadap pelaksanaan Perda

Untuk mengetahui apakah DPRD sering memberikan pengarahan mengenai pelaksanaan Perda dapat kita ketahui setelah kita melihat table berikut ini.

Tabel V:8 Tanggapan responden terhadap pengarahan yang diberikan mengenai Pelaksanaan Perda

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	7	23,3
2	Kadang-kadang	13	43,3
3	Tidak pernah	10	33,3
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Informasi yang dapat kita peroleh dari tabel diatas bahwasanya sebanyak 7 orang atau 23 % responden menyatakan sering, sedangkan sebanyak 13 orang atau 43,3% responden menyatakan Kadang-kadang dan sebanyak 10 orang atau 33,3 % menyatakan tidak pernah.

Pengarahan terhadap pelaksanaan peraturan daerah sangat diperlukan, karena merupakan salah satu upaya DPRD dalam mengadakan monitoring terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah yang berlandaskan peraturan perundang undangan dan peraturan daerah yang telah ditetapkan agar sejalan sediakalanya.

Berdasarkan jawaban yang telah diberikan oleh responden, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya para anggota DPRD belum memaksimalkan pemberian pengarahan terhadap peraturan daerah. Hal ini terbukti dengan jawaban responden menyatakan kadang kadang sebanyak 13 orang atau sekitar 33,3%.

B. Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD

Untuk mendukung akuntabilitas pelaksanaan anggaran, disamping dibutuhkan adanya internal kontrol juga dibutuhkan adanya eksternal kontrol yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksana fungsi eksternal kontrol yang dikenal dalam sistem pengawasan di Indonesia salah satunya adalah DPRD. Pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran daerah pada dasarnya dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Artinya APBD mampu menyerap usulan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas dimaksud sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain harus mampu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat daerah dan sejalan dengan kerangka kebijaksanaan nasional atas dasar prinsip negara kesatuan.

Pengawasan oleh dewan merupakan suatu proses yang berlangsung terus menerus dalam keseluruhan siklus APBD. Hal ini dimaksudkan agar setiap penyimpangan yang terjadi sejak dini telah diketahui dan dapat dengan mudah dilakukan perbaikan atau penyesuaian. Desentralisasi fiskal telah memberikan kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola keuangan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang lebih diarahkan pada tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Tabel V:9 Pagu atau Plapon anggaran tahun 2009 Kabupaten Karimun

Urusan atau SKPD		Plafon Anggaran (RP)	Keterangan
	Urusan Wajib		
1	Pendidikan		
1.1	Dinas/Badan/Kantor	Rp. 179.475.857.110	
1.2			
2	Kesehatan		
2.1	Dinas/Badan/Kantor	Rp. 98.711.721.410	
3	Pekerjaan umum		
3.1	Dinas/Badan/Kantor	Rp.242.292.407.098	
4	Pendapatan		
	Dinas/Badan/Kantor	Rp. 53.842.757.133	
5	Pehubungan		
	Dinas/Badan/Kantor	Rp. 40.895.011.422	
7	Lingkungan Hidup, Kebersihan, Dan Pertamanan		
	Dinas/Badan/Kantor	Rp. 21.537.102.853	
8	Kependudukan Dan Catatan Sipil		
	Dinas/Badan/Kantor	Rp. 26.921.378.566	
9	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kesatuan Bangsa		
	Dinas/Badan/Kantor	Rp. 17.460.689.283	
10	Sosial		
	Dinas/Badan/Kantor	Rp 19.152.827.140	
11	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak		

	Dinas/Badan/Kantor	Rp 12.179.344.285	
12	Perindustrian dan Perdagangan		
	Dinas/Badan/Kantor	Rp 29.639.723.568	
13	Pariwisata		
	Dinas/Badan/Kantor	Rp 10.768.551.427	
14	Ketenagakerjaan		
	Dinas/Badan/Kantor	Rp 12.563.309.998	
15	Pemuda Dan Olahraga		
	Dinas/Badan/Kantor	Rp 17.947.585.711	
16	Pertanahan		
	Dinas/Badan/Kantor	Rp 11.384.275.713	
17	Pertambangan Dan Energi		
	Dinas/Badan/Kantor	Rp 25,050.206.425	
18	Sekretariat		
	Dinas/Badan/Kantor	Rp 77.556.536.411	

Sumber DPRD Kabupaten Karimun 2009

Data diatas merupakan pembagian pagu anggaran sementara yang dilaksanakan oleh Kabupaten Karimun pada tahun anggaran 2009 yang berjumlah sebesar Rp 897.379.285.553,00 . Yang mana terdapat penjelasan pembagian atas anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan kepada Dinas Badan maupun Kantor yang dalam tatanan pemerintahan Kabupaten Karimun.

1. Pembuatan Agenda Pengawasan Terhadap APBD

Langkah awal yang harus ditempuh dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD adalah menentukan agenda pengawasan. Agenda pengawasan ini merupakan kerangka peran DPRD dalam melaksanakan fungsi Pengawasan.

Agenda pengawasan sekurang kurangnya berisi tentang penetapan dan kesepakatan hal hal sebagai berikut (objek yang diawasi dengan sekala prioritas, tingkat pengawasan yang dilaksanakan, komisi atau anggota yang terlibat dan kapan pelaksanaan yang akan dilakukan).

Untuk mengetahui apakah tanggapan responden sering membuat agenda pengwasan terhadap APBD dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel V:10 Tanggapan responden mengenai pembuatan agenda pengawasan APBD.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	9	30
2	Kadang-kadang	14	46,6
3	Tidak pernah	7	23,3
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Tabel diatas menunjukkan hanya 9 orang yaitu 30% responden yang menjawab sering pembuatan agenda pengawasan APBD, 14 orang responden atau sekitar 46,3% menjawab kadang kadang, dan 7 orang atau sekitar 23,3% responden menjawab tidak pernah. Hal ini memperlihatkan bahwa pembuatan agenda tentang pengawasan terhadap APBD belum telaksana dengan baik.

Tidak berjalannya fungsi pembuatan agenda pengawasan terhadap APBD Hal ini terlihat karena masih terasa dini masa jabatan oleh anggota DPRD Kabupaten Karimun priode 2009-2014 mungkin membutuhkan waktu untuk mengoptimalkan kinerjanya.

2. Pemberian pengarahan terhadap pencapaian target pelaksanaan APBD

Pencapaian target atau tujuan dari sesuatu yang dilakukan merupakan tolak ukur dari sebuah keberhasilan. Begitu juga dengan penetapan APBD yang telah direncanakan dari semula ada setidaknya ada target tertentu yang ingin dicapai. Untuk itu dalam pencapaian target dari pelaksanaan APBD ini diperlukan pengawasan atau *controlling* dari berbagai pihak. Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam bidang APBD yaitu dengan memberikan pengarahan agar pengalokasian dari APBD telaksana sesuai dengan target.

Berikut ini akan dipaparkan didalam tabel berupa tanggapan responden terhadap pemberian pengarahan pencapaian target dari pengalokasian APBD antara lain.

Tabel V:11 Tanggapan responden terhadap pemberian pengarahan pencapaian target dari pengalokasian APBD

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	16	53,3
2	Kadang-kadang	11	36,6
3	Tidak pernah	3	9,9
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Tabel diatas mendeskripsikan bahwa terhadap pemberian pengarahan pencapaian target dari pengalokasian APBD sebanyak 16 orang yaitu sekitar 53,3%, responden menyatakan sering, sekitar 11 orang atau sekitar 36,6% menyatakan kadang kadang dan 3 orang atau sekitar 9,9% responden

menyatakan tidak pernah, sehingga menjadi suatu kewajaran apabila pencapaian target dari pengalokasian APBD kurang berhasil dengan maksimal. Namun sebagian besar anggota legislatif Kabupaten Karimun menyadari bahwa pentingnya pemberian pengarahan pencapaian target dari pengalokasian APBD.

3. Pengarahan yang diberikan berupa mendidik kearah yang lebih baik

Untuk mengetahui pendapat responden apakah pengarahan yang diberikan berupa mendidik kearah yang lebih baik dalam pencapaian target awal dari pelaksanaan APBD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V.12 Tanggapan Responden apakah pengarahan yang diberikan berupa mendidik kearah yang lebih baik

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	10	33,3
2	Kadang-kadang	18	59,9
3	Tidak pernah	2	6,6
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa 10 orang atau sekitar 33,3% responden menyatakan sering memberikan pengarahan yang bersifat mendidik, 18 orang atau sekitar 59,9% responden menyatakan kadang kadang, sedangkan 2 orang atau sekitar 6,6% menyatakan tidak pernah. Dari jawaban responden diatas dapat diartikan bahwa pemberian pengarahan kearah yang lebih baik dalam pencapaian target dari oleh DPRD Kabupaten Karimun belum maksimal dan masih

cukup jarang hal ini terlihat dengan jawaban responden yang menyatakan kadang kadang sebesar 18 orang atau sekitar 59,9 %.

4. Tindak penyimpangan dari pelaksanaan APBD

Ibarat pepatah mengatakan tidak ada gading dibumi ini yang tidak retak, tiada manusia yang tidak berbuat kesalahan. Setidaknya begitu juga dengan pelaksanaan APBD dalam suatu daerah kemungkinan kecil penyimpangan akan tetap terjadi hal ini dikarenakan rendahnya moral bangsa kita.

Untuk mengetahui apakah DPRD Kabupaten Karimun pernah menemui tindak penyimpangan dari pelaksanaan APBD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V:13 Tanggapan Responden apakah pernah menemui tindak penyimpangan dari pelaksanaan APBD

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	0	0
2	Kadang-kadang	2	3,3
3	Tidak pernah	28	93,3
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden tidak ada yang memberi jawaban sering yaitu 00,00%, sedangkan yang menjawab kadang-kadang 2 orang yaitu sekitar 3,3% dan yang menjawab tidak pernah 28 orang atau sekitar 93,3%. Ini menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Karimun tidak menemukan tindak penyimpangan dari pelaksanaan APBD.

5. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD bersama dengan anggota komisi lainnya dengan baik

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam organisasi yaitu adanya kerja tim yang solid dalam menanggapi suatu situasi. Begitu juga dengan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD bersama dengan anggota komisi lainnya dengan baik.

Dalam penelitian ini ditanyakan, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap APBD bersama dengan anggota komisi lainnya dapat terealisasi dengan baik. khususnya dalam hal pengawasan bersama komisi lainnya. Untuk mengetahui apakah fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Karimun terhadap pelaksanaan APBD bersama dengan anggota komisi lainnya sudah telaksana dengan baik dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel V:14 Tanggapan responden mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap APBD bersama dengan anggota komisi lainnya dengan baik.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	13	43,3
2	Kadang-kadang	15	50
3	Tidak pernah	2	6,6
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Dari tabel V.14 diatas terdapat 13 atau 43,3 % dari responden mengatakan sering dan 15 atau 50 % dari responden mengatakan kadang kadang kemudian terahir terdapat 2 atau 6,6 % dari responden mengatakan tidak pernah.

C. Pengawasan Terhadap Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Untuk mengetahui bentuk pengawasan DPRD Kabupaten Karimun terhadap kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2009 berdasarkan tabel dapat digambarkan

Tabel V:15 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

No	Bulan	Kegiatan Yang Dilaksanakan
1	Juli 2009	Penyelenggaraan kerjasama daerah yang mana diatur dalam Perda Nomor 11 tahun 2009 yang merupakan hasil perubahan perda Nomor 11 2008 yang dilaksanakan tahun terdahulu.
2	Agustus 2009	Kunjungan Kerja Terhadap PT saipem didesa pongka oleh DPRD Kabupaten
3	September 2009	Rapat komisi tentang pembayaran dan pemberian dana CD PT Timah tbk.
4	November 2009	Laporan pertanggung atas pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dan pembiayaan daerah terhdap kerjasama tersebut
5	Desember 2009	Sidang Pemilihan Pencalonan dan penseleksian Terhadap Pimpinan PRUSDA Kabupaten Karimun.

**Sumber DPRD Kabupaten Karimun 2009*

Pengawasan terhadap kerjasama di daerah diarahkan agar Pemerintah Daerah tidak melakukan kesalahan yang mempunyai dampak langsung pada kerugian masyarakat di daerah, baik secara finansial, fisik maupun sosial. Oleh karena itu pengawasan DPRD terhadap kerjasama oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga baik Internasional dan antar daerah, yang dilakukan harus jelas ruang lingkup yang dilakukan secara tepat

1. Apakah Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap kerjasama ininternasional telah telaksana dengan optimal.

Agar kerjasama dapat berjalan dengan baik dan sejalan dengan peraturan dan ketentuannya maka dibutuhkan satu media sebagai penengah terutama dalam hal mengawasi. Untuk itu dengan berdasarkan undang undang No 32 tahun 2004 yang mengatur salah satunya Fungsi pengawasan. Dimana terdapat pengawasan terhadap kerjasama dengan pihak ketiga.

Untuk mengetahui apakah Pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Karimun terhadap kerjasama ininternasional telah telaksana dengan optimal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V:16 Tanggapan responden terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan kejasama internasional atau pihak ketiga.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sudah	19	63,3
2	Kadang-kadang	8	26,6
3	Tidak pernah	3	9,9
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Dari tabel V.16 tersebut diatas dapat diuraikan bahwa Pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Karimun terhadap kerjasama ininternasional telah telaksana dengan optimal, ternyata 19 atau 63,3 % dari responden sudah melaksanakan pengawasan terhadap kerjasama dengan pihak ketiga dan 8 atau 26,6 mengatakan kadang kadang serta 3 atau 9,9 % lagi tidak pernah melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga atau internasional.

2. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga atau internasional sudah telaksana dengan baik

Perusahaan asing yang beroperasi di daerahnya masing-masing merupakan aset bagi pemasukan pendapatan hasil daerah setidaknya bisa menampung tenaga kerja di daerah tersebut. Perusahaan-perusahaan asing tersebut merupakan bentuk kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar atau pihak ketiga.

Yang menjadi rangsangan suatu perusahaan mau beroperasi di suatu daerah dikarenakan potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah dan letak daerahnya yang strategis. Dalam penelitian ini dimana peran DPRD Kabupaten Karimun dituntut untuk mengetahui apakah Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga atau internasional sudah telaksana dengan baik sebagai salah satu sarana melaksanakan dalam pelaksanaan pengawasan. Untuk itu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel V:17 Tanggapan responden mengenai Pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga atau internasional sudah telaksana dengan baik

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sudah	12	40
2	Kadang-kadang	16	53,3
3	Tidak pernah	4	13,3
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Dari tabel V.17 di atas terlihat, 12 atau 40 % dari responden mengatakan bahwa pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga atau internasional sudah telaksana dengan baik, dan 16 atau 53,3 % dari responden mengatakan

pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga atau internasional kadang kadang telaksana dengan baik, kemudian 4 atau 13,3 % dari responden mengatakan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga atau internasional tidak pernah telaksana dengan baik.

3. Pemberian pengarahan, pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap kerjasama dengan pihak ketiga.

Salah satu tugasnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kerjasama dengan pihak ketiga. Dimana DPRD harus dapat mengarahkan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah bahwa yang dikerjasamakan hendaknya yang menjadi urusan daerah yang telah diamanatkan dalam Undang Undang No 32 pasal 10.

Untuk mengetahui apakah tanggapan responden mengenai Pemberian pengarahan, pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V:18 Tanggapan responden mengenai Pemberian pengarahan, pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap kerjasama dengan pihak ketiga

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sering	7	23,3
2	Kadang-kadang	20	66,6
3	Tidak pernah	3	9,9
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Berdasarkan keterangan tabel V.18 diatas terlihat bahwa 7 orang atau sekitar 23,3% responden menyatakan sering memberikan pengarahan, pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap kerjasama dengan pihak ketiga, 20 orang atau sekitar 66,6% responden menyatakan kadang kadang, sedangkan 3 orang atau sekitar 9,9% menyatakan tidak pernah. Dari jawaban responden diatas dapat diartikan bahwa pemberian pengarahan, pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap kerjasama dengan pihak ketiga oleh DPRD Kabupaten Karimun belum maksimal dan masih cukup jarang hal ini terlihat dengan jawaban responden yang menyatakan kadang kadang sebesar 20 orang atau sekitar 66,6 %.

4. Manfaat yang dirasakan dari kerjasama dengan pihak ketiga terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Salah satu faktor dalam pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga atau internasional adalah sejauh mana hasil kerjasama yang telah dilaksanakan bermanfaat bagi penunjang kesejahteraan rakyat disuatu daerah tersebut.

Dalam penelitian ini ditanyakan manfaat yang telah dirasakan dari pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga maupun internasional khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti halnya pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas umum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V:19 Tanggapan responden Manfaat yang dirasakan dari kerjasama dengan pihak ketiga terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

No	Manfaat Dari Kejasama	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Bermanfaat	17	56,6
2	Cukup Bermanfaat	13	43,3
3	Tidak Bermanfaat	0	0
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Dari tabel V.19 diatas terdapat 17 atau 56,6 % dari responden mengatakan Manfaat yang dirasakan dari kerjasama dengan pihak ketiga terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bermanfaat bagi masyarakat dan 13 atau 43,3 % dari responden mengatakan cukup bermanfaat kemudian terakhir tidak terdapat dari seorangpun responden mengatakan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga tidak bermanfaat.

5. Sumber pembiayaan dari pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.

Dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 ayat 1 yang berbunyi: Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut setiap sumber pembiayaan kerjasama, baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga, tetap mengacu pada peraturan perundang undangan tentang keuangan daerah dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan daerah, terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan APBD. Pengawasan DPRD terhadap sumber pembiayaan kerjasama adalah mengetahui

secara jelas dan pasti dari mana pembiayaan kerjasama dan dapat mengetahui hasil kerjasama, berupa (benda, barang, jasa dan uang) kemudian didistribusikan kemana.

Untuk mengetahui apakah tanggapan responden mengenai sumber pembiayaan yang pasti dan jelas dari kerjasama yang diadakan pemerintah daerah dengan pihak ketiga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V:20 Tanggapan responden mengenai sumber pembiayaan yang pasti dan jelas dari kerjasama yang diadakan pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Mengetahui	13	43,3
2	Kadang kadang	10	33,3
3	Tidak Pernah	7	23,3
Jumlah		30	100%

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Dari table V.20 diatas terdapat 13 orang atau 43,3 % dari responden mengatakan Mengetahui mengenai sumber pembiayaan dengan pasti dan jelas dari kerjasama yang diadakan pemerintah daerah dengan pihak ketiga dan 10 atau 33,3 % dari responden mengatakan kadang kadang kemudian terahir terdapat 7 orang atau sekitar 23,3 % Responden mengatakan Tidak Pernah mengetahui secara jelas dan pasti sumber pembiayaan dari kerjasama yang diadakan pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

D. Wawancara terhadap Fungsi pengawasan DPRD

Wawancara atau Interview, yaitu: pengumpulan data oleh peneliti dengan cara menanyakan secara langsung kepada pihak terkait DPRD kabupaten Karimun untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid baik menggunakan alat pencatat maupun alat bantu lainnya adapun pertanyaan yang penulis sajikan antara lain sebagai berikut

- 1. Dalam satu tahun terakhir ini yaitu tahun 2009 berapa Raperda kah yang telah bapak/saudara bahas dan disetujui menjadi Perda.?**

Tabel V:21 Tanggapan dari wawancara terhadap peraturan daerah yang telah di bahas dan disetujui.

No	Permasalahan yang jadi bahan di wawancara	Jumlah Raperda	Jumlah Perda
1	Dalam satu tahun terakhir ini yaitu tahun 2009 berapa Raperda kah yang telah bapak/saudara bahas dan disetujui menjadi Perda.?	17	15
Jumlah		17	15

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Dari tabel V.21 ini berdasarkan jawaban yang diberikan oleh responden salah seorang responden yaitu:

Nama : Zamhur, SH

Hari/tanggal : Kamis, 17 Desember 2009

Jam : 09:04 – 09:17 Wib

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun tahun 2009-2014

Partai : Partai Amanat Nasional

Dia adalah Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Karimun yang mana dia pernah pada menjadi anggota DPRD Kabupaten Karimun priode 2004-2009 dia adalah sekretaris di Komisi A . Sebenarnya DPRD pada tahun 2009 telah mengesahkan sebanyak 13 Perda dimana perda tersebut dibahas maupun disahkan oleh anggota DPRD priode tahun 2004-2009 sementara untuk anggota DPRD Priode Ketiga Ini baru mengesahkan sebanyak 2 Perda yang disahkan. Ia mengatakan juga dalam waktu singkat ini kami akan membahas mengenai perda anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009. Dan pemekaran daerah menjadi Kecamatan.

Bergitu juga menurut pernyataan yang dikemukakan oleh Ketua Komisi A priode 2009-2014 pada hari kamis tanggal 17 Desember 2009, jam 13:35-14: 45 Wib, diruangan komisi A yang melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang hukum dan pemerintahan dan dulunya pada priode 2004-2009 dia juga telah menjabat menjadi wakil ketua di sidang yang sama. Dia adalah Jamaluddin Sahari, SH yang merupakan anggota dari fraksi Partai Demokrat.

Jamaluddin Sahari, SH berkomentar bahwa Pada priode 2009-2014 DPRD baru membahas dan menyetujui 2 buah peraturan daerah (PERDA) dari jumlah yang ada yaitu sekitar 15 Perda yang ada. Untuk sisa dari jumlah yang ada merupakan hasil pengesahan Rencana Peraturan Daerah yang telah disepakati menjadi PERDA Kabupaten Karimun pada masa jabatan priode kedua Pada tahun 2009. Dimana terdapat 13 Perda yang terdiri 8 buah Perda dari hasil perubahan perda-perda tahun sebelumnya dan sebanyak 5 buah perda hasil pengesahan bersama.

2. Menurut pengawasan yang bapak lakukan apakah implelementasi dari pelaksanaan APBD Tahun 2009 sudah telaksana secara optimal baik tepat sasaran maupun tepat waktu.?

Perwujudan dari pelaksanaan pengalokasian APBD yaitu tercapainya target awal yang ingin dicapai dari penetapan APBD tentunya secara optimal baik sesuai dengan sasaran dan targetnya sehingga waktu yang telah direncanakan dapat diperkirakan dan digunakan secara efektif dan efisien.

Untuk itu penulis ingin mewawancari beberapa anggota DPRD Kabupaten Karimun atupun perwakilan dari tiap tiap komisi yang ada. Hal ini dalakukan dengan tujuan untuk mengetahui tanggapan mereka terhadap pengawasan yang telah dilakukan terhadap APBD tahun anggaran 2009 terutama apakah implementasi dari pelaksanaan maupun pengalokasian dari APBD sudah telaksana secara optimal baik tepat sasaran.

Tabel V:22 Tanggapan responden apakah implementasi dari pelaksanaan maupun pengalokasian dari APBD sudah telaksana secara optimal baik tepat sasaran.

N O	Pertanyaan yang penulis Lontarkan	Tanggapan responden			
		Ketua	Komisi A	Komisi B	Komisi C
2	Apakah implelementasi dari pelaksanaan APBD Tahun 2009 sudah telaksana secara optimal baik tepat sasaran maupun tepat waktu.?	Sudah hampir	Kadang - kadang	Belum	Belum

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Adapun hasil tabel V.22 merupakan tanggapan responden saat diadakan wawancara mendalam kepada;

1. Nama : Zamhur, SH
- Hari/tanggal : Kamis, 17 Desember 2009
- Jam : 09:17 – 09:25 Wib
- Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun tahun 2009-2014
- Partai : Partai Amanat Nasional

Secara umum berdasarkan pengamatan dan pengwasan yang anggota DPRD laksanakan dimasing masing bidang dapat dikatakan suda hampir telaksana dengan baik hanya saja kendala kendala dilapangan yang diluar perkiraan yang terkadang menjadi hambatan untuk pencapaian taget dari pengalokasian dana anggaran APBD tahun 2009.

Hal ini saya katakan berdasarkan pada APBD tahun anggaran 2009 ini terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada bulan september dan pada bualan sebelumnya para anggota DPRD meminta pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2009 ini merupakan suatu bentu intofeksi akan keadan untuk melakukan perubahan kedepannya. Dari sini saya menilai dari pelaksanaan APBD tahun anggaran 2009 bisa dikatakan sudah telaksana dengan baik sebagai mana dijelaskan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Karimun bapak Zamhur, SH

2. Nama : Jamaluddin Sahari, SH

Pada Hari : Kamis tanggal 17 Desember 2009

Jam : 13:45-13: 55 Wib

Jabatan : Ketua Komisi A DPRD kabupaten karimun tahun 2009-2014,

Dibidang Hukum Dan Pemerintahan

Berdasarkan pengawasan bidang hukum dan pemerintahan yang saya laksanakan sebagai ketua komisi beserta anggota lainy, sebenarnya pengalokasian dari APBD Tahun 2009 dapat dibilang ada sebagian dari pelaksanaannya sudah tercapai dengan baik. Namun ada sebagian lainnya belum menemukan titik terang dikarenakan daerah generalisasinya yang begitu luas sehingga seakan akan timbul pertanyaan dari masing-masing pihak apakah yang harus kita lakukan dan bagian yang mana harus betul betul menjadi di prioritaskan sehingga pengalokasian dari APBD dapat telaksana dengan baik.

3. Nama : Drs. H Ady Hermawan

Pada Hari : Rabu tanggal 16 Desember 2009

Jam : 10:03-10: 23 Wib

Jabatan : Ketua Komisi B DPRD kabupaten karimun tahun 2009-2014,

Bidang Perekonomian, Keuangan Dan Anggaran

Sebenarnya titik berat yang memegang peranan utama dalam hal APBD terletak pada Komisi B dimana daerah kekuasaan kami yang utama adalah untuk menangani masalah dibidang Perekonomian, Keuangan yang ada didaerah dan anggaran yang disahkan oleh daerah.

Pengakuan langsung yang diutarakan oleh Drs. H Ady Hermawan bahwa seluruh anggota Komisi B adalah anggota DPRD Kabupaten Karimun yang baru saja terpilih menjadi anggota DPRD pada priode ketiga ini. Oleh karena itu sedikit hambatan yang mana didalam melaksanakan tugas dan fungsinya ini membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan mengetahui tugas dan fungsinya bisa bekerja dengan optimal.

Bergitu juga dengan APDB yang kami awasi adalah penerusan kebijakan atas APBD perubahan tahun anggaran 2009. Yang mana disini saya menilai bahwasanya pelaksanaannya APBD perubahan tahun anggaran 2009 belum mencapai targetnya. Hal ini terlihat Pedapatan Hasil daerah yang semakin menurun. Salah satu cotohnya pemerintah kabupaten karimun pada tahun 2009 ini tidak mengadakan penerimaan calon pegawai negeri sipil dikarenakan belum bisa dan masih mengatur dalam pengeeluarkan biaya operasionalnya.

4. Nama : H.M. Taufiq, SH

pada hari : Rabu tanggal 16 Desember 2009

Jam : 08:40-08:55 Wib

Jabatan : Ketua Komisi C DPRD kabupaten karimun tahun 2009-2014,

Bidang Pembangunan Dan Lingkungan

Adapun tanggapan yang dikemukakan oleh H. M. Taufiq, SH yang merupakan ketua Fraksi Keadailan pembangunan adapun tangagpan yang ia berikan yaitu:

Mungkin kalau membicarakan pembangunan menjadi tolak ukur dalam pencapaian target dari pelaksanaan APBD belum bisa dikatakan sempurna atau tercapai dengan optimal baik waktu maupun tepat sasaran. Hal ini terlihat masih begitu minimnya daerah-daerah pesisir yang merasakan pembangunan jika dibandingkan dengan pembangunan yang dilaksanakan di daerah kota Kabupaten.

Pembangunan merupakan hasil dari pelaksanaan setiap anggaran. Terkadang dalam hal ini ditemukan para kontraktor proyek pembangunan dimana terdapat kegagalan dalam melaksanakannya. Sehingga tidak bisa melaksanakan pembangunan sesuai dengan tepat waktu dan sasaran. Untuk itu tidak jarang jika kita kadang menemukan proyek proyek yang bermasalah didalam dinas Pekerjaan Umum. Sehingga hasil dari pembangunan itu tidak akan maksimal.

3. Menurut Bapak/Saudara apakah kerjasama internasional yang telah ada sekarang ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah.?

Pendapatan asli daerah merupakan merupakan jantung dari pembiayaan utama dari pelaksanaan pemerintahan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah baik berupa yaitu selain dari pajak dapat juga merupakan hasil dari kerjasama yang dilakukan dengan pihak ketiga maupun internasional. Berikut ini akan disajikan tanggapan responden terhadap apakah kerjasama internasional yang telah ada sekarang ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah beserta penjelasannya .?

Tabel V:23 Tanggapan responden terhadap, apakah kerjasama internasional yang telah ada sekarang ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah.?

N O	Pertanyaan yang penulis lontarkan	Tanggapan responden			
		Ketua	Komisi A	Komisi B	Komisi C
3	Apakah kerjasama internasional yang telah ada sekarang ini memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah.?	Sudah	Cukup	Sudah	Sudah

Sumber : *Data Olahan Hasil Penelitian 2009*

Adapun dari hasil tabel V.23 tersebut merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada:

- Nama : Zamhur, SH

Hari/tanggal : Kamis, 17 Desember 2009

Jam : 09:25 – 09:35 Wib

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun tahun 2009-2014

Partai : Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional

Melihat potensi yang dimiliki oleh karimun dimana karimun merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam daerah Free Trade Zone tentu hal ini merupakan salah satu modal utama bagi Karimun untuk memperlihatkan sumberdaya yang dimiliki dengan kata lain dengan mempromosikan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Secara umum saya melihat bahwa kontribusi yang telah diberikan oleh perusahaan asing yang ada di Karimun lumayan besar dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah. Seperti halnya PT.Timah yang mengelola pengeburan timah dan peleburan yang ada Di Karimun. Ini merupakan sumber utama yang dimiliki oleh Karimun selain pengolahan bahan galian Bouksit. Untuk itu bentuk kerjasama yang diadakan oleh pemerintah daerah telah memberikan kontribusi yang besar.

2. Nama : Jamaluddin Sahari, SH

pada hari : Kamis tanggal 17 Desember 2009

jam : 13:55-14: 03 Wib

Jabatan : Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Karimun tahun 2009-2014,

Dibidang Hukum Dan Pemerintahan

Sesuai dengan bidang yang kami jalani dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setidaknya saya bisa menilai bahwa kontribusi yang diberikan oleh kerjasama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah cukup memberikan pemasukan terhadap pendapatan asli daerah. Tapi jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah pada periode tahun tahun sebelumnya tahun ini lebih kecil. Ketimbang dimana pendapatan asli daerah pada tahun sebelumnya yang dituang dari kerjasama yang ada di Karimun yang bergerak pada sektor pengerokan pasir pada daerah lintas batas pantai dan perairan. Namun sektor kerjasama ini tidak bisa diteruskan dikarenakan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan untuk kedepannya lebih besar.

Untuk sekarang ini pendapatan asli daerah yang ditunjang dari kerjasama yang diadakan pemerintah daerah cukup telaksana dengan baik setidaknya harus ditingkatkan kembali dan memangkas tindakan tindakan yang merugikan seperti adanya perilaku pungli yang merajalela penuturan langsung oleh ketua komisi A bidang hukum dan pemerintahan.

3. Nama : Drs. H Ady Hermawan

Pada Hari : Rabu tanggal 16 Desember 2009

Jam : 10:23-10:31 Wib

Jabatan : Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Karimun tahun 2009-2014,

Bidang Perekonomian, Keuangan Dan Anggaran

Kemudian ini adalah penjelasan langsung yang di utarakan oleh ketua komisi B dimana ia mengatakan Perusahaan dan daerah perusahaan patungan merupakan salah satu bidang generalisasi yang harus menjadi titik fokus yang harus dioptimalkan untuk memberikan kontribusi penuh terhadap pemasukan pendapatan asli daerah. Dengan sektor ini lah setidaknya harapan untuk menjadi daerah yang mandiri yang produktif sehingga memiliki daya saing dengan negara luar.

Jika dilihat secara kedudukannya Karimun memiliki sedikit kelebihan dimana Kabupaten Karimun begitu dekat dan bertetangga dengan negara luar yang sudah maju seperti malaysia dan singapore. Terlebih lagi Kabupaten Karimun merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam zona FTZ (Free Trade Zone) yang mana telah dicanangkan sebelumnya.

Menurut Drs. Ady Hermawan secara garis besar pemasukan yang diberikan oleh kerjasama dengan pihak ketiga sudah baik. Salah satu kerjasama yang dilaksanakan Karimun pada baru baru ini terbentuknya kerjasama dengan PT SAIPEM yang beroperasi dalam fabrikasi anjungan pengeboran lepas pantai yang mana mampu diperkirakan menyerap lebih kurang dalam 5000 orang tenaga kerja yang direkrut dari putra-putra daerah. Terlihat juga dengan keberadaan PT Pacific Granitama yang dulunya merupakan penbobrok pemasukan hasil daerah dan mampu menyerap tenaga kerja. Begitu juga dengan PT Sembawang Group, dan perusahaan daerah lainnya.

4. Nama : H.M. Taufiq, SH

pada hari : Rabu tanggal 16 Desember 2009

Jam : 09:07 - 09:19 Wib

Jabatan : Ketua Komisi C DPRD kabupaten karimun tahun 2009-2014,

Bidang Pembangunan Dan Lingkungan

Wawancara ini menghasilkan penuturan langsung dari Ketua Komisi C yaitu bapak H.M Taufiq, SH yang diadakan langsung di ruangan beliau dan bersama dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Karimun seperti H.M.Asyura SE, Rocky Marciano Bawole dan anggota lainnya.

Argumantasi yang dipapararkan yaitu bahwasanya kontribusi yang diberikan oleh kerja sama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pihak ketiga secara umum sudah bisa dikatakan baik. Namun dilapangnya ada juga bentuk kerjasama yang harus diberhentikan seperti halnya prtambangan batu

granit yang dilaksanakan oleh PT Pacific Granit tbk. Dengan mempertimbangkan keadaan geografis Kabupaten Karimun.

Setidaknya dengan pemberhentian prtambangan tersebut memberikan pengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah yang merupakan sumbangan yang diberikan dari sektor prtambangan sedikit berkurang. Disamping itu dampak yang ditimbulkan adanya pemutusan hubungan kerja yang terjadi. Namun setidaknya karimun sekarang ini masih mengadakan prtambangan timah dan menjajaki pertambangan Boksit yang diadakan didaerah sekitarnya seperti daerah pulau lumut dan lain sebagainya

4. Rekapitulasi Hasil Penelitian Dari Tiap Tiap Variabel

**Tabel V:24 REKAPITULASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD
KABUPATEN KARIMUN TERHADAP PERATURAN
DAERAH**

Nomor Item	A		B		C	
	F	P	F	P	F	P
1	21	69,9%	7	23,3%	2	6,6%
2	17	56,6%	9	30%	4	13,3%
3	23	76,6%	2	6,6%	5	15%
4	6	20%	21	69,9%	3	9,9%
5	7	23,3%	13	43,3%	10	33,3%
Jumlah	74		52		24	

Adapun impormasi yang dapat digambarkan dari data yang disajikan diatas merupakan hasil rekapitulasi dari kuisisioner yang diberikan oleh responden dimana nomor item adalah item pertanyaan yang dari kusisioner tersebut. Untuk huruf **A** merupakan jawaban terhadap pilihan sering. Huruf **B** merupakan

jawaban atas kadang kadang. Sedangkan **C** merupakan jawaban atas tidak pernah. Huruf tersebut berfungsi sebagai alternatif jawaban yang disajikan untuk responden menjawab atas pertanyaan yang utarakan. Sementara huruf **F** disini menggambarkan besarnya jumlah frekuensi alternatif dari keseluruhan jawaban responden atas item pertanyaan yang diberikan dalam kuisiuner. Sedangkan huruf **P** merupakan persentase dari besarnya hasil frekuensi masing-masing alternatif jawaban yang diberikan.

Dalam tabel V.22 diatas dilihat bahwa besanya jumlah frekuensi responden terhadap pertanyaan yang disajikan dalam kuisiunir. Jumlah frekuensi yang menjawab pilihan **A** sebanyak 74 orang responden. Pilihan **B** sebanyak 52 orang responden dan pilihan **C** sebanyak 24 orang

TABEL V.25 REKAPITULASI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN KARIMUN TERHADAP PELAKSANAAN APBD

Nomor Item	A		B		C	
	F	P	F	P	F	P
1	19	30%	14	46,6%	7	23,3%
2	16	53,3%	11	36,6%	3	9,9%
3	10	33,3%	18	59,9%	2	6,6%
4	0	0%	2	3,3%	28	93,3%
5	13	43,3%	15	50%	2	6,6%
Jumlah	58		60		42	

Dari data diatas dapat digambarkan bawasanya besanya jumlah frekuensi jawaban terhadap pilihan **A** sebanyak 58 orang, yang menjawab pilihan **B** sebanyak 60 Orang dan yang menjawab pilihan **C** sebanyak 42 orang.

**TABEL V.26 REKAPITULASI PENGAWASAN DPRD KABUPATEN
KARIMUN TERHADAP PELAKSANAAN KERJASAMA
DENGAN PIHAK KETIGA MAUPUN INTERNASIONAL**

Nomor Item	A		B		C	
	F	P	F	P	F	P
1	19	63,3%	8	26,6%	3	9,9%
2	12	40%	16	53,5%	4	13,3%
3	7	23,3%	20	66,6%	3	9,9%
4	17	56,6%	13	43,3%	0	0%
5	13	43,3%	10	33,3%	7	23,3%
Jumlah	68		67		17	

Impormasi yang dapat diperoleh Dari data diatas adalah bawasanya besanya jumlah frekuensi jawaban terhadap pilihan **A** sebanyak 68 orang, yang menjawab pilihan **B** sebanyak 67 Orang dan yang menjawab pilihan **C** sebanyak 17 orang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan beberapa kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang telah penulis laksanakan, dari kesimpulan tersebut penulis memberikan beberapa saran yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan pada DPRD Kabupaten Karimun.

VI.1 Kesimpulan Penelitian

1. Bahwa secara kuantitas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah dapat dikategorikan baik. Hal ini terlihat bawasanya dari 21 responden atau 69,9% menyatakan sering dari seluruh anggota DPRD Kabupaten Karimun terwakili (responden) sebagai pelaksana fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan para anggota DPRD Kabupaten Karimun memiliki kesadaran untuk berusaha menjalankan fungsinya terhadap pengawasan peraturan daerah dengan baik.
2. Bahwa pernah meminta keterangan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan peraturan daerah oleh kepala daerah yang dilaksanakan oleh DPRD kabupaten karimun yaitu cukup baik yaitu sebanyak 17 orang (56,6%) dari anggota legislative terwakili (responden) dalam permintaan keterangan.

3. Sebanyak 23 orang atau 76,6 % Responden menyatakan implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Karimun terhadap perda sudah telaksana dengan baik.
4. Dilihat dari hasil pernyataan penerimaan masukan dari masyarakat Dalam Pembahasan Atau Penyiapan Raperda. Belum maksimal telaksana atau tertampung aspirasi masyarakat dengan kata lain kurang baik. Ini terbukti sebanyak 21 orang atau 69,9 % responden menyatakan kadang kadang,dan yang menyatakan sering hanya 6 orang atau sebesar 20 %.
5. Secara kualitas para anggota DPRD Kabupaten Karimun belum memaksimalkan pemberian pengarahan terhadap peraturan daerah. Hal ini terbukti dengan jawaban responden menyatakan kadang kadang sebanyak 13 orang atau sekitar 33,3%.
6. Dalam hanya pembuatan agenda pengawasan terhadap APBD 9 orang yaitu 30% responden yang menjawab sering pembuatan agenda pengawasan APBD, 14 orang responden atau sekitar 46,3% menjawab kadang kadang, dan 7 orang atau sekitar 23,3% responden menjawab tidak pernah hal ini memperlihatkan pembuatan agenda tentang pengawasan terhadap APBD belum telaksana dengan baik.
7. Tngkat pemberian pengarahan pencapaian target dari pengalokasian APBD sebanyak 16 orang yaitu sekitar 53,3%, responden menyatakan sering
8. Pemberian pengarahan kearah yang lebih baik dalam pencapaian target dari oleh DPRD Kabupaten Karimun belum maksimal dan masih cukup jarang

hal ini terlihat dengan jawaban responden yang menyatakan kadang kadang sebesar 18 orang atau sekitar 59,9 %.

9. Anggota DPRD Kabupaten Karimun tidak menemukan tindak penyimpangan dari pelaksanaan APBD Terlihat 0,00% Responden menjawab sering.
10. Tingkat Pelaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD bersama dengan anggota komisi lainnya dengan baik ternyata separuh dari anggota DPRD reponden 50 % Menjawab kadang kadang bias bekerjasama dengan baik dengan anggota komisi lainnya.
11. Frekwensi Pelaksanaan pengawasan DPRD Kabupaten Karimun terhadap kerjasama ininternasional telah telaksana dengan optimal, ternyata 19 atau 63,3 % dari responden sudah melaksanakan pengawasan terhadap kerjasama dengan pihak ketiga
12. Terdapat 16 atau 53,3 % dari responden mengatakan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga atau internasional kadang kadang telaksana dengan baik, secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya belum telaksana dengan baik.
13. Tingkat pemberian pengarahan, pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap kerjasama dengan pihak ketiga oleh DPRD Kabupaten Karimun belum maksimal dan masih cukup jarang hal ini terlihat dengan jawaban responden yang menyatakan kadang kadang sebesar 20 orang atau sekitar 66,6 %.

14. Frekuensi responden mengatakan Manfaat yang dirasakan dari kerjasama dengan pihak ketiga terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bermanfaat bagi masyarakat terdapat 17 orang atau 56,6 %.
15. Terdapat 13 orang atau 43,3 % dari responden mengatakan Mengetahui mengenai sumber pembiayaan dengan pasti dan jelas dari kerjasama yang diadakan pemerintah daerah dengan pihak ketiga
16. Adapun jumlah raperda yang telah dibahas menjadi perda pada tahun 2009 berjumlah 15 Perda.
17. Implementasi dari pelaksanaan APBD tahun anggaran 2009 belum telaksana dengan Baik terlihat berdasarkan jawaban responden.
18. Kerjasama yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan pihak ketiga secara umum telah memberikan kontribusi yang lumayan besar terhadap pendapatan asli daerah. Seperti mana pernyataan yang dibuat oleh responden dari masing-masing komisi dan wakil ketua I DPRD Kabupaten Karimun.
19. Dapat disimpulkan bahwasanya pengawasan yang telah dilaksanakna oleh DPRD Kabupaten Karimun dengan baik adalah dalam pelaksanaan peraturan daerah dan yang memberikan konrtibusi terhadap pendapatan asli daerah yaitu kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Pengawasan yang harus ditingkatkan agar memberikan hasil yang efektif dan efisien yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan APBD kabupaten karimun agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya.

VI.2 Saran saran

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh dprd secara optimal setidaknya DPRD Kabupaten Karimun harus melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

1. Menentukan agenda pengawasan

Agenda pengawasan ini merupakan kerangka peran DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Setidaknya agenda pengawasan berisi tentang penetapan kesepakatan bersama.

2. Menentukan metodologi pengawasan

Proses penentuan metodologi pengawasan merupakan proses menyusun dan menetapkan teknik dan prosedur pengawasan yang baku untuk setiap kegiatan. Penentuan metodologi ini dimaksudkan memberikan pedoman atau pegangan kepada anggota maupun kelengkapan DPRD dalam melaksanakan Pengawasan.

3. Menjalin hubungan dengan instansi terkait dan aliansi strategis

Dprd menetapkan dan mempersiapkan lembaga yang terkait dengan fungsi pengawasan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung hal ini diperlukan karena:

- a) Sebagai wakil rakyat dan unsure penyelenggara pemerintah daerah DPRD harus dapat menjalankan Fungsi pengawasan dan mempertanggung jawabkannya kepada rakyat.

- b) Dengan mempertimbangkan luasnya ruang lingkup pengawasan meliputi aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, maka tidak mungkin DPRD mampu melaksanakan pengawasan sendiri

4. Pelaksanaan pengawasan

Pelaksanaan pengawasan ini hendaklah dilaksanakan secara rutin yang mana fungsi pengawasan DPRD dapat dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan pengawasan triwulan, pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan secara formal dan informal. Efisiensi dan Efektifitas pengawasan diharapkan dapat tercapai apabila kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan metode yang ada.

5. Menyusun laporan

Pelaporan merupakan Output dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD. Kualitas laporan yang dihasilkan oleh DPRD hendak mencapai tujuan pengawasan itu sendiri yaitu:

- a) Laporan DPRD dapat memberikan arah kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b) Laporan DPRD harus bermanfaat dalam memberikan motivasi terhadap pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan tindakan koreksi atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- c) Laporan DPRD menghasilkan sistem peringatan diri (*Early Warning System*) bagi manajemen pemerintah daerah yang

memberitahukan manajemen pemerintahan daerah bahwa terjadi penyalangan pelaksanaan program.

- d) Laporan DPRD dapat memberikan Keyakinan tentang akuntabilitas publik pemerintah daerah kepada masyarakat bahwa tujuan pembangunan sudah berhasil atau belum berhasil mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan masyarakat.

6. Membentuk Staf Ahli

Agar setiap tugas dan fungsi dari DPRD Kabupaten Karimun dapat terlaksana dengan baiknya sebaiknya DPRD Kabupaten Karimun membentuk staf ahli untuk membantunya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dilapangan di setiap bidang maupun di komisinya.

DAFTAR PUSTAKA

Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, PT RINEKA CIPTA,
Jakarta 2002.

Erenie Tisnawati. Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*, Kencana
Prenada Media Group, Jakarta 2008

Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2005

Inue Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi
Aksara. Jakarta 2003.

Josef Riwo Kaho, *Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Markus Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota Legislatif*,
Transmedia Pustaka, Jakarta 2008

Miriam Budiarjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta 2005.

Panji Anuraga, *Pengantar Bisnis Modern*, Pustaka Jaya, Jakarta 1996

Sadu Wasistiono, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*,
FOKUSMEDIA, Bandung 2009

Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi Negara*. Bumi aksara, Jakarta 2003

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung 2005

Undang Undang RI Nomor 27 tahun 2009 *Tentang Susunan Dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, DAN DPRD.*

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah.*

Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.*

DAFTAR LAMPIRAN

1. Angket (Kuesioner).
2. Surat Penunjukan Pembimbing I
3. Surat Penunjukan Pembimbing II
4. Surat Keterangan Izin Riset dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Suska Riau.
5. Surat Rekomendasi Penelitian dari BPMD dan KESBANG Kabupaten
Karimun Provinsi Kepulauan Riau.
6. Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian dari DPRD Kabupaten
Karimun

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pengawasan DPRD Kabupaten Karimun Terhadap peraturan daerah dari tahun 2004-2008.....	14
Tabel I.2	Pengawasan DPRD Kabupaten Karimun Terhadap APBD dari Tahun 2004-2008	15
Tabel I.3	Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Karimun Terhadap Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	18
Tabel I.3	rapat kerja dan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Karimun.....	19
Tabel V.1	Jawaban Responden Tentang Pendidikan	64
Tabel V.2	Tabel Penempatan kedudukan anggota DPRD Kabupaten Karimun	64
Tabel V.3	Anggota DPRD Kabupaten Karimun Berdasarkan Umur	69
Tabel V.4	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Pengawasan Peraturan daerah.....	69
Tabel V.5	Tanggapan Responden Mengenai Permintaan Keterangan Kepada Daerah Terhadap Pelaksanaan Perda.....	70
Tabel V.6	Tanggapan Responden Megenai Implementasi Fungsi Pengawasan.....	71
Tabel V.7	Tanggapan Responden Apakah Sering Menerima Masukan Dari Masyarakat Dalam Pembahasan Atau Penyiapan Raperda.....	72
Tabel V.8	Tanggapan Responden Terhadap Pengarahan Yang di Berikan Mengenai Pelaksanaan Perda	74
Tabel V.9	Pagu atau Plapon APBD tahun 2009 Kabupaten Karimun.....	76
Tabel V.10	Tanggapan Responden Mengenai Pembuatan Angenda Pengawasan APBD	78
Tabel V.11	Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Pengarahan Pencapaian Target dari Pengalokasian APBD	79
Tabel V.12	Tanggapan Responden Apakah Pengarahan yang di Berikan berupa Pendidikan Kearah Yang Lebih Baik	80
Tabel V.13	Tanggapan Responden Apakah Pernah Menemui Tindak Penyimpangan dari Pelaksanaan APBD	81
Tabel V.14	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap APBD Bersama Dengan Anggota Komusi Lainnya Dengan Baik.....	82
Tabel V.15	Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kerjasama dengan Pihak Ketiga.....	83
Tabel V.16	Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kerjasama Intrenasional atau Pihak Ketiga	84
Tabel V.17	Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga Atau Internasional Sudah Terlaksana dengan Baik	85
Tabel V.18	Tanggapan Responden Mengenai Pemberian Pengarahan, Pendapat dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Daerah Terhadap kerjasama Dengan pihak Ketiga	86

Tabel V.19	Tanggapan Responden Manfaat yang dirasakan dari kerjasama dengan pihak ketiga terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.....	88
Tabel V.20	Tanggapan Responden Mengenai Sumber Pembiayaan Yang Pasti dan Jelas Dari Kerjasama yang Diadakan Pemerintah Daerah Dengan Pihak ketiga.....	89
Tabel V.21	Tanggapan Dari Wawancara Terhadap Peraturan Daerah Yang Telah Dibahas dan disetujui.....	90
Tabel V.22	Tanggapan Responden Apakah Implementasi dari Pelaksanaan Maupun Pengalokasian dari APBD Sudah Terlaksana Secara Optimal Baik Tepat Sasaran	92
Tabel V.23	Tanggapan Responden Terhadap, Apakah Kerjasama Internasional Yang Telah Ada Sekarang Ini Memberikan Kontribusi Besar Terhadap Pendapatan Asli Daerah?.....	97
Tabel V.24	Rekapitulasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten karimun Terhadap Peraturan Daerah.....	101
Tabel V.25	Rekapitulasi Pengawasan DPRD Kabupaten Karimun Terhadap Pelaksanaan APBD	103

KUESIONER

FUNGSI PENGAWASAN DPRD

I. Petunjuk Pengisian Angket

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Bapak/Saudara untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada.
2. Angket ini disusun semata-mata untuk penelitian ilmiah dan tidak akan berpengaruh kepada Bapak/Saudara.
3. Lingkari atau beri tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Atas Kesediaan bapak/saudara mengisi dan mengambil angket ini tepat waktunya saya ucapkan terima kasih.

II. Identitas Responden

- a. Pendidikah Ahir :
- b. Komisi :
- c. Umur :

III. Daftar Pertanyaan

i. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

1. Apakah Bapak/Saudara sering melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah

2. Apakah Bapak/Saudara pernah meminta pertanggung jawaban kepala daerah terhadap PERDA yang dilaksanakan ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah
3. Apakah implementasi dari fungsi pengawasan terhadap PERDA yang Bapak/Saudara laksanakan telah telaksana dengan baik ?
 - a. Sudah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah
4. Apakah bapak/saudara sering menerima masukan dari masyarakat baik secara lisan maupun tulisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah
5. Apakah Bapak/Saudara memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan PERDA yang telah diputuskan ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah

ii. Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD

1. Apakah Bapak/Saudara sering membuat agenda pengawasan terhadap APBD ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah
2. Apakah bapak/saudara sering memberikan pengarahan terhadap pencapaian target dari pelaksanaan APBD ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah
3. Apakah pengarahan yang telah diberikan oleh Bapak/Saudara berupa mendidik kearah yang lebih baik dalam pencapaian taget awal pelaksanaan APBD ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah
4. Apakah Bapak/Saudara pernah menemukan tindak penyimpangan dari pelaksanaan APBD ?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah

5. Apakah Bapak/Saudara dapat bekerja dengan baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD bersama anggota komisi maupun anggota komisi lainya ?
- a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah

iii. Pengawasan terhadap Kerjasama dengan Pihak Ketiga

1. Apakah Bapak/saudara telah melaksanakan pengawasan terhadap kerjasama internasional secara optimal ?
- a. Sudah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
2. Menurut Bapak/Saudara apakah pelaksanaan kerjasama internasional di daerah telah telaksana dengan baik ?
- a. Sudah
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
3. Apakah Bapak/Saudara sering memberikan pengarahan, pendapat, dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap kerjasama pihak ketiga?
- a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah

4. Apakah Bapak/Saudara melihat, merasakan manfaat dari kerjasama internasional, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?
- a. Bermanfaat
 - b. Cukup Bermanfaat
 - c. Tidak Bermanfaat
5. Apakah Bapak/Saudara mengetahui secara jelas dan pasti sumber pembiayaan dari pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga ?
- a. Mengetahui
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Pernah

WAWANCARA

Fungsi Pengawasan DPRD

1. Dalam satu tahun terakhir ini berapakah RAPERDA yang telah Bapak/Saudara bahas dan disetujui menjadi Perda.?

.....
.....

2. Menurut Bapak/Saudara apakah implementasi dari pelaksanaan APBD tahun ini sudah telaksana secara optimal baik tepat sasaran dan tepat waktu ?

.....
.....

3. Menurut Bapak/Saudara apakah kerjasama internasional yang telah ada sekarang ini memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah ?

.....
.....